

BUKU AJAR

**STUDI
DIPLOMASI
KAWASAN:
ASIA TIMUR**

ANDIKA DRAJAT MURDANI

STUDI DIPLOMASI KAWASAN ASIA TIMUR

Penulis:

Andika Drajat Murdani

Penerbit



Unisri Press © 2023

Studi Diplomasi Kawasan Asia Timur

Penulis:

Andika Drajat Murdani

Editor:

Halifa Haqqi

ISBN: 978-623-5859-55-2

Desain sampul: Roni Setyawan

Tata Letak: Nabila Salsabila

Penerbit:

UNISRI Press

Redaksi:

Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo,

Banjarsari, Kota Surakarta

Press.unisri.ac.id/ unisri.press

unisripress@gmail.com

Anggota APPTI

Cetakan Pertama, 2023, Mei

Copyright © 2023

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Prakata

Puji syukur ke Hadirat Allah Yang Maha Esa, tak henti penulis haturkan karena telah berhasil menyelesaikan buku “Studi Diplomasi Kawasan Asia Timur” dengan baik. Buku ini merupakan wujud dedikasi penulis dalam menyajikan literatur memadai bagi para pelajar atau umum yang hendak mendapat informasi tentang Asia Timur, terutama dari sudut pandang diplomasi dalam hubungan internasional. Buku ini disusun dalam bentuk buku ajar, sehingga memudahkan bagi para pembaca, terutama mahasiswa/pelajar dalam mendalami materi pada kawasan Asia Timur.

Buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan bagi para pembaca yang ingin memahami kontestasi dinamika diplomasi yang terjadi di kawasan Asia Timur. Sajian buku dipaparkan secara singkat dan padat, tanpa mengurangi esensi materi penting yang perlu diketahui. Terdapat materi tentang diplomasi kawasan yang berlangsung di masa sejarah, yang ditujukan sebagai landasan historis yang dapat menggambarkan referensi kondisi saat ini di Asia Timur. Nilai historis yang terjadi di suatu kawasan penting disajikan karena dapat menunjukkan benang merah

tentang kondisi era kini, dan menjadi gambaran tentang latar belakang diplomasi suatu kawasan. Selain itu, tentu disajikan pula paparan-paparan analisis tentang dinamika diplomasi yang berlangsung oleh negara-negara utama di kawasan Asia Timur, yakni Jepang, China dan Korea Selatan.

Penulis memahami bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari kelengkapan isi maupun cara penyajian. Begitu banyak informasi yang dapat disajikan tentang Asia Timur. Namun, hanya materi pokok yang dinilai penting oleh penulis yang dituangkan dalam buku. Karenanya, penulis menerima masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat menambah wawasan, materi, dan penyempurnaan buku ini pada kesempatan selanjutnya.

Penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian buku ini, dan semoga buku ini dapat menebar manfaat seluas mungkin bagi pembaca.

Surakarta, 1 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA III

DAFTAR ISI V

BAB I PERJALANAN HISTORI JEPANG1

A. POKOK BAHASAN 2

B. URAIAN MATERI2

1. Kekalahan Jepang Masa Perang Dunia2

2. Fase Satu: Konstitusi Baru Jepang7

3. Fase Dua: Pecahnya Perang Korea9

4. Fase Tiga: Menuju Ekonomi Baru 10

C. PENDALAMAN MATERI14

BAB 2 PERJALANAN HISTORI CHINA 15

A. POKOK BAHASAN 16

B. URAIAN MATERI16

1. China Masa Perang Dunia II 16

2. Kebangkitan Komunias China19

3. Perjalanan Chiang Kai Sek25

4. China Era Mao 30

C. PENDALAMAN MATERI33

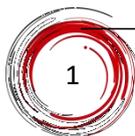
BAB 3 PERJALANAN HISTORI KOREA	34
A. POKOK BAHASAN	35
B. URAIAN MATERI	35
1. <i>Pembagian Korea yang Satu</i>	35
2. <i>Perjalanan Korea Utara</i>	39
3. <i>Masa Awal Korea Selatan</i>	52
4. <i>Upaya Reunifikasi Korea</i>	55
C. PENDALAMAN MATERI	61
BAB 4 DINAMIKA KAWASAN ASIA TIMUR..	62
A. POKOK BAHASAN	63
B. URAIAN MATERI	63
1. <i>Pengaruh Dunia Internasional terhadap Keamanan Kawasan Asia Timur</i>	63
2. <i>Aliansi Militer Kawasan Asia Timur</i>	69
3. <i>Geoekonomi Kawasan Asia Timur</i>	80
C. PENDALAMAN MATERI	90
DAFTAR PUSTAKA	91
PROFIL PENULIS	100

Bab I

Perjalanan Histori Jepang



Jepang adalah negara kepulauan di wilayah Asia Timur yang dikenal sebagai salah satu negara maju karena berbagai teknologinya. Negara dengan luas daratan sekitar 378.000 km² tersebut kerap dilanda bencana alam seperti badai, gempa bumi dan gunung api, karena lokasinya yang ada di cincin api vulkanik pasifik. Meski banyak bencana yang sering melanda, Jepang dinilai memiliki kemampuan memulihkan diri dengan cepat. Hal ini pun terbukti dari sejarah perjalanan Jepang pasca perang dunia kedua. Sempat luluh lantakh karena bom dari Amerika Serikat, tapi Jepang cepat bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi yang penting untuk diperhitungkan di kawasan Asia Timur.



a. Pokok Bahasan

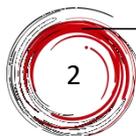
Materi pokok bahasan yang ditargetkan untuk dipahami pada bab ini, meliputi:

1. Kekalahan Jepang masa perang dunia
2. Fase-fase pemulihan Jepang pasca perang dunia kedua.

b. Uraian Materi

1. Kekalahan Jepang Masa Perang Dunia

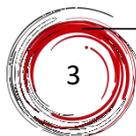
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Jepang hancur. Semua kota besar (kecuali Kyoto), jaringan industri dan transportasi rusak parah. Kekurangan pangan yang parah berlanjut selama beberapa tahun. Perkembangan setelah perang pada hakekatnya merupakan perubahan arah dan peningkatan taraf



masyarakat industri. Pembentukan teknologi nasional pada dasarnya selesai pada tahun 1920-an.

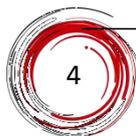
Fondasi penting untuk pendidikan dan disiplin modern diciptakan, seperti birokrasi yang canggih, pekerja yang berkualitas, dan nilai-nilai budaya. Selain itu, pendudukan Amerika mencegah Jepang mengambil jalan memutar menuju modernisasi lebih lanjut. Kekacauan sosial dan ekonomi akan menyusul, tetapi dalam batas-batas terbatas dan tanpa revolusi sosial/politik. Dikotomi struktural telah berakhir dan Jepang sedang dalam transisi ke struktur sosio-ekonomi baru.

Masyarakat dicirikan oleh jutaan dispersi dan gangguan dalam subsistem sosio-ekonomi yang berbeda. Itu bergerak seperti Sungai Yangzi - aliran utamanya berubah setiap beberapa ratus tahun, tetapi ke arah tertentu alirannya terus-menerus kacau. Jepang menderita korban dan kerusakan akibat serangan udara, serangan angkatan laut, dan serangan kapal selam.



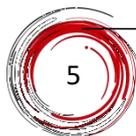
Selain dua ibu kota kuno Kyoto dan Nara, kota Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan oleh bom atom dan 119 kota lainnya dibom, menghancurkan 2,2 juta rumah dan menyebabkan 9 juta orang kehilangan tempat tinggal. Sekitar 40 persen harta benda sipil negara hilang. Pabrik, jalan, jembatan, saluran listrik, saluran air, gedung sekolah, rumah sakit, dan sistem komunikasi rusak parah. Penambangan, produksi, dan pengapalan mengalami kerugian besar. Selama beberapa tahun setelah kekalahan tersebut, standar hidup Jepang tetap sekitar 30 persen dari tingkat tinggi sebelum perang (1935-1937).

Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Amerika Serikat memimpin sekutu dalam menduduki dan merehabilitasi Jepang. Antara tahun 1945 dan 1952, kekuatan pendudukan Amerika, yang dipimpin oleh Jenderal Douglas A. MacArthur, menerapkan reformasi militer, politik, ekonomi, dan sosial yang luas. Pendudukan Sekutu di Jepang dimulai pada Agustus 1945 dan berakhir pada April 1952.



Jenderal MacArthur adalah panglima tertinggi pertama. Seluruh operasi terutama dilakukan oleh Amerika Serikat. Dalam serangkaian konferensi masa perang, para pemimpin negara sekutu Inggris, Uni Soviet, Republik Tiongkok, dan Amerika Serikat membahas perlucutan senjata Jepang, menangani koloninya (terutama Korea dan Taiwan), menstabilkan ekonomi Jepang, dan banyak lagi. lebih lanjut tentang masa depan untuk mencegah remilitarisasi negara. Dalam Deklarasi Potsdam mereka menuntut penyerahan Jepang tanpa syarat; Pada Agustus 1945 tujuan itu tercapai.

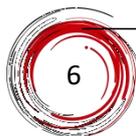
Pada bulan September 1945, Jenderal Douglas MacArthur memegang komando tertinggi Sekutu (SCAP) dan mulai membangun kembali Jepang. Meskipun Inggris Raya, Uni Soviet, dan Republik Tiongkok memainkan peran konsultatif di Dewan Sekutu, MacArthur memiliki otoritas pengambilan keputusan akhir. Pendudukan Jepang dapat dibagi menjadi tiga fase:



upaya pertama untuk menghukum dan mereformasi Jepang, bekerja untuk menghidupkan kembali ekonomi Jepang, dan pembentukan perjanjian dan aliansi perdamaian formal.

Profesi seperti reformasi Taika pada abad ke-7 dan Restorasi Meiji 80 tahun sebelumnya merupakan periode perubahan sosial dan kelembagaan yang cepat berdasarkan pinjaman luar negeri dan bentuk usaha. Prinsip-prinsip umum pemerintahan Jepang yang diusulkan dituangkan dalam Deklarasi Potsdam dan dijelaskan dalam pernyataan kebijakan pemerintah AS yang disiapkan pada Agustus 1945 dan diteruskan ke MacArthur. Inti dari kebijakan ini jelas dan sederhana:

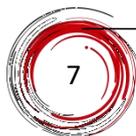
Demiliterisasi Jepang sehingga tidak lagi menjadi ancaman bagi perdamaian; demokratisasi, yang berarti bahwa meskipun tidak ada bentuk pemerintahan tertentu yang akan diberlakukan di Jepang, upaya akan dilakukan untuk mengembangkan sistem politik di mana hak-hak individu dijamin dan dilindungi; dan pendidikan



ekonomi yang cukup untuk mendukung Jepang yang damai dan demokratis.

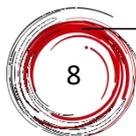
2. Fase Satu: Konstitusi Baru Jepang

Fase pertama terjadi sekitar akhir perang tahun 1945 hingga 1947, menyebabkan perubahan paling mendasar dalam pemerintahan dan masyarakat Jepang. Sekutu menghukum Jepang karena militerisme dan ekspansionisme masa lalunya dengan mengadakan pengadilan kejahatan perang di Tokyo. Pada saat yang sama, SCAP membubarkan militer Jepang dan melarang mantan tentara memimpin posisi politik di pemerintahan baru. Di bidang ekonomi, SCAP meluncurkan reforma agraria yang ditujukan untuk menguntungkan petani mayoritas dan mengurangi kekuatan pemilik tanah yang kaya. Banyak dari mereka mendukung perang dan mendukung ekspansionisme Jepang pada tahun 1930-an. MacArthur juga mencoba menghancurkan konglomerat korporat besar Jepang (zaibatsu) untuk



mengubah ekonomi menjadi sistem kapitalis pasar bebas. Pada tahun 1947, penasihat Sekutu mendiktekan konstitusi baru kepada kepemimpinan Jepang. Di antara perubahan paling signifikan pada dokumen tersebut adalah untuk mengurangi status kaisar menjadi boneka tanpa kendali politik dan memperkuat sistem parlementer dengan kekuasaan, memperkuat hak dan keistimewaan perempuan, dan meninggalkan hak untuk berperang. Penghapusan semua kekuatan pertahanan non-negara.

Konstitusi baru mulai berlaku pada tahun 1947. pada saat itu, Kaisar kehilangan semua kekuatan politik dan militer dan hanya menjadi simbol negara. Hak pilih universal diperkenalkan dan hak asasi manusia dijamin. Jepang juga dilarang berperang lagi atau memelihara pasukan. Selain itu, Shintoisme dan negara sangat berbeda satu sama lain. MacArthur juga bermaksud untuk menghancurkan konsentrasi kekuasaan dengan membubarkan zaibatsu dan bisnis besar lainnya serta mendesentralisasi sistem pendidikan dan

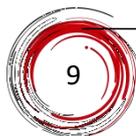


kepolisian. Reforma agraria menghilangkan konsentrasi kepemilikan tanah.

3. Fase Dua: Pecahnya Perang Korea

Pada akhir 1947 dan awal 1948, Jepang mengalami krisis ekonomi dan ketakutan akan penyebaran komunisme menyebabkan penilaian ulang terhadap kebijakan pendudukan. Periode ini terkadang disebut sebagai "roda gigi mundur". Pada masa pendudukan yang berlangsung hingga tahun 1950 itu, kebangkitan ekonomi Jepang menjadi pusat perhatian. SCAP mulai khawatir bahwa ekonomi Jepang yang lemah akan meningkatkan pengaruh gerakan komunis dalam negeri, dan dengan kemungkinan besar kemenangan komunis dalam Perang Saudara Tiongkok, masa depan Asia Timur tampaknya terancam.

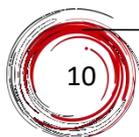
Langkah-langkah yang diambil oleh penguasa pendudukan untuk memerangi ekonomi yang memburuk berkisar dari reformasi pajak hingga



pengendalian inflasi. Namun, masalah terbesar adalah kurangnya bahan baku yang diperlukan untuk memasok pasar barang industri dan manufaktur Jepang. Pecahnya Perang Korea pada tahun 1950 memberi SCAP kesempatan yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini, membuat beberapa pejabat pendudukan percaya bahwa "orang Korea datang dan menyelamatkan kami". Setelah PBB memasuki Perang Korea, Jepang menjadi depot pasokan penting bagi pasukan PBB. Konflik tersebut juga menempatkan Jepang dalam batas perkembangan pertahanan AS di Asia, meyakinkan kepemimpinan Jepang bahwa terlepas dari status militernya, tidak akan ada ancaman nyata terhadap tanah Jepang.

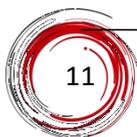
4. Fase Tiga: Menuju Ekonomi Baru

Pada fase ketiga pendudukan, dimulai pada tahun 1950, SCAP menganggap masa depan politik dan ekonomi Jepang aman dan mulai menyelesaikan perjanjian perdamaian resmi yang mengakhiri



perang dan pendudukan. Persepsi Amerika tentang ancaman internasional sangat berubah antara tahun 1945 dan 1950 sehingga gagasan Jepang dan militer bersenjata tidak lagi mengkhawatirkan pejabat Amerika; Sebaliknya, ancaman nyata tampaknya adalah gerakan komunis, khususnya di Asia.

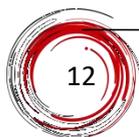
Perjanjian akhir memungkinkan AS untuk mempertahankan pangkalan di Okinawa dan di tempat lain di Jepang, dan pemerintah AS menjanjikan perjanjian keamanan bilateral kepada Jepang. Pada bulan September 1951, 52 negara bertemu di San Francisco untuk membahas perjanjian tersebut dan kemudian 49 dari mereka menandatangani. Partai oposisi terkemuka termasuk Uni Soviet, Polandia, dan Cekoslowakia, yang semuanya memprotes janji yang dibuat oleh politisi Amerika kepada Jepang bahwa mereka akan mendukung ROC dan tidak berdagang dengan RRT. Politik di bawah pendudukan dan konstitusi baru berubah secara signifikan, karena banyak pemimpin sebelum perang Jepang disingkirkan dari jabatan publik dan dua partai sebelum perang Seiyūkai dan



Minseitō diorganisasi ulang menjadi Partai Liberal dan Partai Progresif (yang kemudian menjadi Partai Liberal).

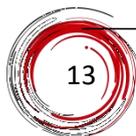
Di sebelah kiri, kaum sosialis dan komunis juga mereorganisasi partai mereka. Banyak kelompok sempalan politik berpartisipasi dalam pemilihan pertama pasca perang. Karena tidak ada konsensus, kabinet cenderung tidak stabil dan berumur pendek. Ini berlaku untuk kabinet pertama, Yoshida Shigeru (1946-1947), yang menerapkan sebagian besar reformasi awal SCAP tetapi digantikan oleh kabinet sementara yang dipimpin oleh sosialis Katayama Tetsu (1947-48).

Nasib serupa menimpa Ashida Hitoshi, yang menjadi perdana menteri selama lima bulan pada tahun 1948. Kembalinya Yoshida berkuasa pada musim gugur 1948 menyebabkan situasi yang lebih stabil dan mengantarkan era Yoshida, yang berlangsung hingga 1954. Pada tahun-tahun itu, Jepang adalah mengambil alih. Ekonomi kerja sama erat dengan Amerika Serikat selama Perang Korea



(1950-1953), yang meletakkan dasar bagi rekonstruksi nasional dan hubungan penting pascaperang antara Amerika Serikat dan Jepang.

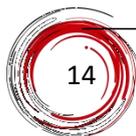
Pada tahun 1951, Yoshida mencapai pencapaian terbesarnya - pemulihan kedaulatan nasional - dengan mengundang Jepang ke Konferensi Perdamaian San Francisco. Di sana ia membahas detail akhir perjanjian damai dengan Jepang dengan negosiator Amerika John Foster Dulles dan perwakilan dari 47 negara. Perjanjian itu secara resmi ditandatangani pada 8 September 1951 dan pendudukan Jepang berakhir pada 28 April 1952.



c. **P**endalaman Materi

Jepang memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejarah Jepang telah dimulai dari masa perburuan dan budidaya padi dari hasil alam. Sepanjang perjalanan sejarahnya, banyak dinamika yang terjadi termasuk zaman kerajaan atau keshogunan, hingga akhirnya Jepang menjadi salah satu penjajah di benuanya sendiri. Sejarah penting selanjutnya dimulai pada masa pasca perang sehingga memunculkan Jepang yang baru.

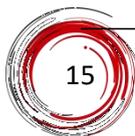
Jelaskan apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah Jepang dalam membangun Jepang yang baru, pasca perang dunia kedua?



Bab 2

Perjalanan Histori China

China adalah negara dengan wilayah terluas di kawasan Asia Timur. Negara ini kini juga dikenal memegang andil penting dalam ekonomi politik di kawasan Asia Timur, bahkan di seluruh dunia. Perekonomiannya yang tumbuh pesat dalam waktu singkat membuat dunia tercengang. China yang saat ini dikenal sebagai *new industrial country* ataupun *new emerging country* memiliki sejarah perjalanan yang amat panjang. Bahkan, ada banyak kisah menegangkan dibalik munculnya China Komunis saat ini. Sebab, China Komunis sebetulnya adalah identitas dari pemerintahan yang baru. Para pemimpin China yang dulu telah melewati benturan kepentingan yang begitu sengit sehingga menghasilkan pergantian kekuasaan serta pemerintahan secara drastis.



a. Pokok Bahasan

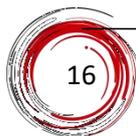
Materi pokok bahasan yang ditargetkan untuk dipahami pada bab ini, meliputi:

1. China pada masa perang dunia kedua
2. Kebangkitan komunis di China

b. Uraian Materi

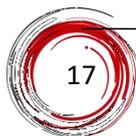
1. China Masa Perang Dunia II

Perang Dunia Kedua adalah konflik yang melanda hampir seluruh belahan dunia antara tahun 1939 dan 1945. Bentrokan terjadi antara Kekuatan Poros, yang sebagian besar termasuk Jerman, Italia, dan Jepang, dan Kekuatan Sekutu, yang meliputi Inggris Raya, Prancis, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Cina. Masa itu adalah konflik paling berdarah dalam sejarah militer - dan perang terbesar.



Menurut beberapa perkiraan, Cina menderita 14 juta korban selama Perang Dunia II, di antara sekitar 35 juta orang Cina yang meninggal atau terluka selama lebih dari satu dekade pendudukan Jepang. Dari ribuan orang Tionghoa, yang sebagian besar ditangkap oleh Jepang dan ditawan, hanya 56 yang ditemukan hidup sebelum perang berakhir. Perang Dunia Kedua berakhir di Pasifik pada September 1945, ketika bom atom Amerika di Hiroshima dan Nagasaki mendorong Jepang keluar dari perang.

Meskipun pasukan Jepang diusir dari China, akhir Perang Dunia II tidak berarti perdamaian segera dapat dinikmati oleh masyarakat China. Di Cina, konflik telah meletus menjadi perang saudara berskala penuh pada tahun 1920-an, sebelum pendudukan Jepang. Perang saudara berkecamuk di Tiongkok. Di dataran Manchuria, pasukan pemerintah pusat Chiang Kai-shek berjuang untuk supremasi melawan kekuatan militer Cina Stalin.



Konflik ini diwarnai ketegangan antara nasionalis Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok yang menyebabkan perang berkepanjangan yang berlangsung hingga tahun 1949. Akhir dari konflik ini adalah ketika Mao Zedong menyatakan kemenangan Komunis dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di bawah kepemimpinannya.

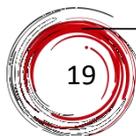
Orang asing diusir dari negara itu karena pemerintah nasional memperketat kendalinya, dan upaya untuk sepenuhnya mengubah budaya tradisional China dimulai saat China memulai proses reunifikasi setelah dua konflik brutal. Inilah masa-masa China yang baru, dengan warna baru, tatanan baru, wajah baru, pemerintahan baru dan kekuasaan baru, yang didominasi oleh kekuatan komunis Mao.



2. Kebangkitan Komunias China

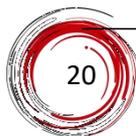
Komunis mulai mendominasi dengan kekuatan penuh di Beijing pada tahun 1949. Sebelumnya, Partai Komunis Tiongkok, didirikan di Shanghai pada tahun 1921, awalnya berfungsi sebagai kelompok belajar yang bekerja sama dengan Partai Nasionalis sebagai bagian dari Front Persatuan Pertama. Komunis Tiongkok bergabung dengan Tentara Nasionalis dalam Ekspedisi Utara 1926-1927 untuk menyingkirkan bangsa panglima perang yang menghalangi pembentukan pemerintahan pusat yang kuat. Kerja sama ini berlanjut hingga "Teror Putih" tahun 1927, ketika kaum nasionalis menyerang komunis, membunuh mereka, atau mengusir mereka dari partai.

Ketika Jepang menginvasi Manchuria pada tahun 1931, pemerintah Republik Tiongkok (ROC) menghadapi tiga ancaman: invasi Jepang, pemberontakan komunis, dan pemberontakan para panglima perang. Kecewa karena pemimpin Nasionalis Chiang Kai-shek berfokus pada ancaman



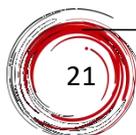
internal daripada serangan terhadap Jepang, sekelompok jenderal menculik Chiang pada tahun 1937, memaksanya untuk mempertimbangkan kembali bekerja dengan tentara komunis. Seperti upaya pertama kerja sama antara pemerintah nasionalis dan PKC, front persatuan kedua berumur pendek. Kaum Nasionalis menggunakan cara-cara yang diperlukan untuk menahan kaum Komunis daripada hanya berfokus pada Jepang, sementara kaum Komunis berupaya meningkatkan pengaruh mereka di masyarakat pedesaan.

Selama Perang Dunia II, dukungan populer untuk komunis tumbuh. Pejabat AS di China melaporkan tindakan keras diktator terhadap perbedaan pendapat di wilayah yang dikuasai Nasionalis. Kebijakan tidak demokratis ini, ditambah dengan korupsi masa perang, membuat pemerintah ROC rentan terhadap ancaman komunis. Akan tetapi, PKT berhasil dalam upaya reformasi agraria awalnya dan dipuji oleh para petani atas upaya tanpa henti mereka untuk melawan pendudukan Jepang.



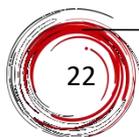
Pada tahun 1945, pemimpin partai nasionalis dan komunis, Chiang Kai-shek dan Mao Zedong, bertemu dalam serangkaian pembicaraan untuk membentuk pemerintahan pascaperang. Keduanya sepakat tentang pentingnya demokrasi, persatuan militer, dan kesetaraan bagi semua partai politik di Tiongkok. Gencatan senjata tetap rapuh, dan meskipun upaya berulang kali dilakukan oleh Jenderal Amerika George Marshall untuk merundingkan kesepakatan, kedua belah pihak memperdebatkannya hingga tahun 1946. Ketidakpercayaan selama bertahun-tahun di antara kedua pihak mencegah upaya untuk membentuk pemerintahan koalisi.

Ketika perang saudara 1947-49 meningkat, kemenangan komunis akhirnya menjadi semakin mungkin. Meskipun Komunis tidak lagi menguasai kota-kota besar setelah Perang Dunia II, mereka memiliki dukungan akar rumput yang kuat, organisasi dan moral militer yang unggul, dan tumpukan besar senjata yang disita dari gudang-gudang di Manchuria Jepang. Bertahun-tahun



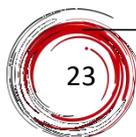
korupsi dan salah urus melemahkan dukungan populer untuk pemerintah nasionalis. Pada awal 1947, pemerintah ROC menganggap provinsi pulau Taiwan, di lepas pantai provinsi Fujian, sebagai kemungkinan mundur.

Meskipun pejabat administrasi Truman tidak yakin akan pentingnya strategis bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan hubungan dengan China Nasionalis, tidak ada seorang pun di pemerintahan AS yang ingin disalahkan karena mendorong "kekalahan" China dari komunisme. Bantuan militer dan keuangan kepada kaum nasionalis yang sakit terus berlanjut, meskipun tidak dalam skala yang diinginkan Chiang Kai-shek. Pada Oktober 1949, setelah beberapa kemenangan militer, Mao Zedong mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok; Chiang dan tentaranya melarikan diri ke Taiwan untuk berkumpul kembali dan merencanakan upaya mereka untuk menaklukkan daratan.



Kemampuan China dan Amerika Serikat untuk menemukan titik temu setelah berdirinya negara China yang baru terhambat oleh politik dalam negeri dan ketegangan global. Pada Agustus 1949, pemerintahan Truman menerbitkan "Buku Putih China", di mana kebijakan AS sebelumnya terhadap China didasarkan pada prinsip bahwa hanya angkatan bersenjata China yang dapat memutuskan hasil perang saudara mereka. Sayangnya bagi Truman, langkah itu tidak melindungi pemerintahannya dari tuduhan "kehilangan" China.

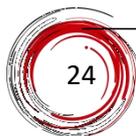
Sifat revolusi yang belum selesai, yang meninggalkan pemerintah dan militer Nasionalis yang terfragmentasi dan diasingkan tetapi masih vokal di Taiwan, hanya memperkuat perasaan di kalangan anti-komunis Amerika bahwa hasil perjuangan tidak dapat diubah. Pecahnya Perang Korea, yang menempatkan Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat di pihak yang berseberangan dalam konflik internasional, mengakhiri semua kemungkinan rekonsiliasi antara



Tiongkok dan Amerika Serikat. Keinginan Truman untuk mencegah konflik Korea menyebar ke selatan menyebabkan kebijakan Amerika untuk melindungi pemerintahan Chiang Kai-shek di Taiwan.

Lebih dari 20 tahun setelah Revolusi China pada tahun 1949, hanya ada sedikit kontak, perdagangan terbatas, dan tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara. Hingga tahun 1970-an, Amerika Serikat terus mengakui ROC di Taiwan sebagai pemerintah de facto Tiongkok dan mendukung pemerintah tersebut melalui kursi Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

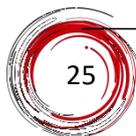
Partai Komunis Tiongkok memenangkan perang saudara yang brutal. Era baru kepemimpinan komunis di bawah Mao Zedong dimulai. Para pemimpin negara mulai memodernisasi dan mengindustrialisasi Tiongkok. Tetapi modernitas ini harus berkarakter komunis yang bertentangan dengan nilai-nilai kapitalis.



3. Perjalanan Chiang Kai Sek

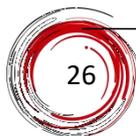
Dari tahun 1927, ketika Chiang Kai-shek mendirikan kediktatoran Kuomintang di atas reruntuhan Revolusi Tiongkok, hingga tahun 1937, ketika invasi Jepang ke Tiongkok dimulai, kelas pekerja tetap tidak aktif secara politik. Ledakan ekonomi pada tahun 1934 memberikan beberapa dorongan bagi kebangkitan serikat pekerja. Namun dari segi organisasi dan kesadaran politik, proletariat masih merupakan faktor kelas yang dapat diabaikan. Jika kelas penguasa Cina di bawah Chiang mencoba melawan invasi Jepang pada tahun 1937, hal ini sebagian harus dijelaskan oleh kelemahan politik massa, yang diekspresikan dalam egalitarianisme proletariat, yang ditekankan oleh kolaborator kelas yang terdegradasi. Politik Stalinis. Chiang hanya dapat melakukan perlawanan bersenjata melawan Jepang jika dia yakin ruang kelas di belakang dapat dipertahankan secara substansial.

Pada awal Perang Tiongkok-Jepang, kota-kota pesisir utama direbut Jepang setelah industrinya



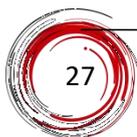
dihancurkan oleh pengeboman dan tembakan artileri. Ini merupakan pukulan keras bagi kelas pekerja. Pada akhir 1937, setelah pasukan Tiongkok mengevakuasi Shanghai, jumlah pekerja pabrik di kota itu turun 90 persen - dari 300.000 menjadi 30.000. Tetapi selama pendudukan Jepang, ledakan ekonomi terus berlanjut dan pada Desember 1941, menjelang tahun Perang Pasifik, jumlah pekerja industri dalam arti sebenarnya naik menjadi sekitar 250.000.

Tetapi sejak blokade AS di pantai China, industri ini terputus dari bahan baku dan pasar luar negeri, produksi listrik (bergantung pada batu bara) menurun, dan pasar domestik memburuk dengan cepat. Kekuatan jumlah kaum proletar industri sekali lagi berkurang tajam. Menjelang penyerahan Jepang, ada sekitar 150.000 pekerja industri di Shanghai. Menurut laporan Biro Urusan Sosial Pemerintah Kota Shanghai, sekarang terdapat 500.000 pekerja di pabrik-pabrik industri kota. Namun, jumlah ini juga mencakup karyawan usaha kecil dan berpotensi sejumlah besar karyawan toko. Nyatanya, jumlah



pekerja industri tidak bisa lebih banyak dari sebelum penyerahan Jepang.

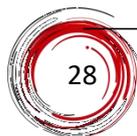
Shanghai adalah pusat industri terbesar di Cina. Kemunduran ekonominya mencerminkan nasib pusat industri lain seperti Hankow dan Tientsin. Namun, penurunan proletariat industri di kota-kota ini diimbangi dengan peningkatan industrialisasi di Barat Daya setelah pusat-pusat militer dan politik dipindahkan ke wilayah tersebut pada akhir tahun 1937. Tidak ada informasi yang dapat dipercaya mengenai jumlah pabrik, ditentukan atau jumlah karyawan yang dipekerjakan di dalamnya. Namun, menurut Kementerian Perekonomian, sekitar 20.000 pabrik, masing-masing mempekerjakan hingga 30 pekerja, dibangun dalam waktu delapan tahun. Sekarang ada sedikitnya 600.000 pekerja industri modern di China barat daya. Intervensi industri modern dalam interior pedesaan ini adalah fakta yang akan memiliki signifikansi politik yang sangat besar di masa depan. Sebelum perang, industri China sebagian besar terbatas pada daerah pesisir yang sempit. Gerakan buruh secara



geografis terisolasi dari gerakan petani di pedalaman. Saat ini, sebagian besar ekonomi industri berakar kuat di jantung bumi.

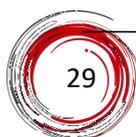
Penyerahan Jepang menyebabkan kelompok baru industri Cina. Sebagian besar pabrik di Shanghai ditutup dan banyak pabrik domestik berhenti beroperasi. Ini adalah satu lagi kemunduran bagi proletariat Cina. Namun, berakhirnya perang membuat para pekerja dapat turun ke jalan lagi untuk berperang. Selama perang, kaum buruh mengambil alih propaganda patriotik dan chauvinistik Kuomintang, yang secara alami diikuti oleh kaum Stalinis. Di wilayah pendudukan Jepang, kaum buruh tunduk di depan sepatu bot penjajah imperialis. Tetapi ketika perang berakhir, kebohongan patriotik Kuomintang dan Stalin dengan cepat kehilangan kekuatannya. Para pekerja sekali lagi menolak untuk menerima eksploitasi dan kesengsaraan yang mereka alami.

Kaum nasionalis mundur ke pulau Taiwan pada bulan Desember 1949. Dengan terbentuknya



pemerintahan komunis, semua ekstrateritorialitas - sebuah sistem di mana hukum Tiongkok tidak terkait dengan kekuasaan kolonial dan mengatur bagian-bagian negara yang sebenarnya - hampir dihapuskan. diusir dari Cina ketika pemerintah mulai menjabat. Sebuah perjalanan panjang dan seringkali penuh gejolak untuk mengubah negara yang dulunya besar, kini sedang runtuh. Permusuhan Barat terhadap Republik Rakyat Tiongkok, yang meningkat akibat Perang Korea, berkontribusi pada intensitas hubungan Tiongkok-Soviet di kemudian hari.

Pada tahun-tahun berikutnya, dukungan berkelanjutan dari Amerika Serikat untuk Republik Chiang Kai Shek Tiongkok, yang didirikan di pulau Taiwan, dan penolakan Republik Rakyat Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat hubungan diplomatik menjadi tidak mungkin. Presiden Richard Nixon memecahkan kebuntuan dengan kunjungan mengesankan ke China Komunis pada Februari 1972. Amerika Serikat memperbarui pengakuan diplomatik resmi pada 1979. Sekitar 1,2

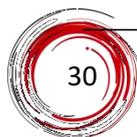


juta orang bermigrasi ke Taiwan dari Tiongkok pada akhir 1940-an dan awal 1950-an dengan pemerintahan Republik Tiongkok (Taiwan).

4. China Era Mao

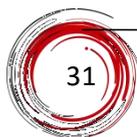
Dalam pidatonya pada tahun 1949, Presiden Mao menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat sosialis dan kemudian komunisme dunia. Sasaran ini, katanya, membutuhkan transformasi kota konsumen menjadi kota produksi untuk menciptakan landasan di mana "kekuatan politik rakyat dapat dikonsolidasikan." Dia merekomendasikan pembentukan aliansi dari empat elemen kelas menengah perkotaan - borjuasi kecil dan borjuasi nasional - dengan buruh dan tani di bawah kepemimpinan BPK. Sebuah negara-bangsa membentuk kediktatoran untuk menekan "kelas lawan" yang dibentuk oleh penentang rezim.

Pernyataan hukum otoritatif tentang "kediktatoran demokratik rakyat" disajikan dalam

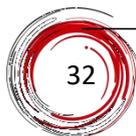


Hukum Konstitusi Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China tahun 1949, dan dalam sesi pertama konferensi, sebuah program bersama yang secara resmi menyetujui organisasi kekuasaan negara dalam sebuah koalisi diadopsi. Setelah kemenangan komunis, seruan yang meluas untuk kembali normal membantu kepemimpinan baru menghidupkan kembali perekonomian. Polisi dan kader partai di masing-masing daerah, dibantu oleh kesatuan militer, mulai menekan kegiatan kriminal yang berkaitan dengan keruntuhan ekonomi. Segera kita akan dapat berbicara tentang rencana pengembangan jangka panjang.

Pada tahun 1950-an, negara ditata ulang dan reformasi sosial yang penting dilaksanakan, seperti larangan poligami dan restrukturisasi desa menjadi komunitas. Akan tetapi, pada akhir dasawarsa itu, terdapat kesenjangan yang lebar antara Cina dan Uni Soviet, salah satu dari sedikit pendukung Cina pada tahap awal Perang Dingin itu.



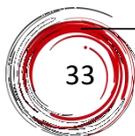
Pada tahun 1960-an, pemimpin Partai Komunis China Mao Zedong mulai merasa bahwa kepemimpinan partai China saat ini, seperti kepemimpinan Uni Soviet, terlalu jauh ke arah revisionis, menekankan keahlian di atas kemurnian ideologis. Posisi Mao sendiri dalam pemerintahan melemah setelah Lompatan Jauh ke Depan yang gagal (1958-60) dan krisis ekonomi yang diakibatkannya. Ketua Mao Zedong mengumpulkan sekelompok radikal, termasuk istrinya Jiang Qing dan Menteri Pertahanan Lin Biao, untuk membantunya menyerang pimpinan partai yang ada dan memperkuat otoritasnya.



c. **P**endalaman Materi

China mengalami sejarah perjalanan yang panjang dengan segala dinamikanya. Dalam perjalanannya sejak sebelum perang dunia II meletus, China telah mengalami konflik kepentingan yang berubah menjadi perang saudara, yang berlangsung hingga akhir perang dunia kedua.

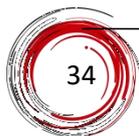
Jelaskan perubahan apa saja yang terjadi di China sesudah perang dunia II, sebagai hasil dari konflik kepentingan intern China?



Bab 3

Perjalanan Histori Korea

*K*orea Selatan dan Korea Utara adalah dunia negara yang cukup populer di kawasan Asia Timur. Satu sisi, Korea Selatan menjadi sangat populer karena industri kreatifnya yang diwarnai dengan K-Pop, K-Drama dan sejenisnya. Di sisi lain, Korea Utara menjadi negara yang menampilkan sosok bertolak belakang dengan Korea Selatan karena sifatnya yang sangat tertutup dengan dunia luar. Selama berabad-abad sebelum pembagian, semenanjung itu adalah Korea tunggal yang bersatu, diperintah oleh generasi kerajaan dinasti. Diduduki oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang pada tahun 1905 dan secara resmi dianeksasi lima tahun kemudian. Korea menderita di bawah pemerintahan kolonial Jepang selama 35 tahun—sampai akhir Perang Dunia II, hingga akhirnya pembagian menjadi dua negara dimulai.



a. Pokok Bahasan

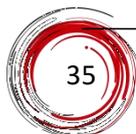
Materi pokok bahasan yang ditargetkan untuk dipahami pada bab ini, meliputi:

1. Kekalahan Jepang masa perang dunia
2. Fase-fase pemulihan Jepang pasca perang dunia kedua.

b. Uraian Materi

1. Pembagian Korea yang Satu

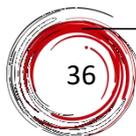
Sejarah Perang Korea dimulai dari pendudukan Jepang di Korea selama 1910-1945. Dari tahun 1910 hingga akhir Perang Dunia II, Korea berada di bawah pendudukan Jepang. Sebagian besar penduduk Korea bekerja sebagai petani pada saat itu. Pada tahun 1930-an, Jepang membangun tambang, bendungan pembangkit listrik tenaga air,



dan pabrik di Korea Utara dan Manchuria. Jumlah warga kelas pekerja Korea meningkat secara dramatis, dan banyak penduduk pindah ke Manchuria untuk bekerja. Oleh karena itu, 65 persen industri berat Korea terletak di Utara, dan hanya 37 persen yang digunakan untuk pertanian.

Di bawah kepemimpinan pemimpin gerilya komunis Kim Il-sung, gerakan melawan pendudukan kolonial-imperialis Jepang tumbuh. Korea Utara kurang terpapar budaya Barat, terutama afiliasi agama. Sejak kehadiran misionaris pada akhir 1800-an, Korea Barat Laut dan Pyongyang begitu kuat dalam agama Kristen sehingga Pyongyang dijuluki "Yerusalem dari Timur".

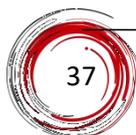
Pada Konferensi Teheran November 1943 dan Konferensi Yalta 1945, Uni Soviet berjanji untuk bergabung dalam Perang Pasifik sebagai sekutu dalam waktu tiga bulan setelah Hari Kemenangan di Eropa. Pada 8 Agustus 1945, Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Pasukan Soviet bergerak maju dengan cepat, dan Washington khawatir Uni



Soviet akan menduduki seluruh Korea. Pada 10 Agustus, pemerintah AS memutuskan untuk memperkenalkan Rute 38 sebagai garis demarkasi antara wilayah yang dikuasai Soviet di utara dan wilayah yang dikuasai AS di selatan. Penarikan dipilih karena akan menempatkan Seoul di bawah kendali AS. Yang mengejutkan Amerika Serikat, Uni Soviet menerima tawaran itu. Biaya masuk diatur dalam Peraturan Umum No.2. Pasal 1 Tentang Penyerahan Jepang (disetujui 17 Agustus 1945). Partisi tersebut memindahkan 16 juta warga Korea Selatan ke blok Amerika dan 9 juta ke blok Soviet.

Pasukan Soviet melancarkan serangan amfibi ke Korea pada 14 Agustus dan dengan cepat menyerbu timur laut. Pada 16 Agustus mereka mendarat di Wonsan. Pada 24 Agustus, Tentara Merah tiba di Pyongyang. Pasukan AS tidak mencapai Selatan hingga 8 September.

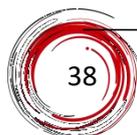
Pada 19 September, Kim Il-sung dan 66 tentara Tentara Merah lainnya tiba di Wonsan. Mereka melawan Jepang di Manchuria pada 1930-an,



tetapi tinggal di Uni Soviet dan berlatih dengan Tentara Merah hingga 1941. Pada 14 Oktober, Uni Soviet memperkenalkan Kim ke Korea Utara sebagai pahlawan gerilya.

Pada Konferensi Moskow pada bulan Desember 1945, Uni Soviet menyetujui proposal AS untuk mendirikan perwalian atas Korea hingga lima tahun. Kebanyakan orang Korea menginginkan kemerdekaan segera, tetapi Kim dan kelompok komunis lainnya mendukung gagasan perwalian di bawah tekanan pemerintah Soviet. Cho Man-shik menolak proposal ini selama rapat umum 4 Januari 1946 dan menghilang dalam tahanan rumah. Pada tanggal 8 Februari 1946, Komisariat Rakyat yang mayoritas komunis direorganisasi. Pemerintah baru melakukan perubahan kebijakan redistribusi tanah, nasionalisasi industri, reformasi hukum perburuhan, dan kesetaraan bagi perempuan.

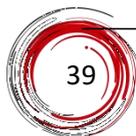
Dapat disimpulkan bahwa terpecahnya semenanjung Korea disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, antara lain keuntungan dan



kerugian mendirikan perwakilan Korea di PBB, bentrok kiri-kanan dan suasana Perang Dingin yang mencekam di semenanjung Korea. Pemilihan demokratis diadakan di Korea Selatan (Korea Selatan) di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pada tanggal 15 Agustus 1948, ROK Korea Selatan, yaitu Republik Korea, secara resmi diumumkan. Dengan demikian, Semenanjung Korea terbagi sempurna menjadi dua bagian.

2. Perjalanan Korea Utara

Korea Utara adalah negara sosialis dengan landasan ideologis komunis. Korea Utara memiliki populasi 23 juta dan tumbuh 2 persen per tahun. Penduduk negara ini terdiri dari beberapa suku bangsa, antara lain Korea, Cina, dan Jepang. Negara ini bermula setelah pecahnya semenanjung Korea, sehingga memunculkan wilayah baru di utara, yang berdiri Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK), dengan Kim il Sung sebagai perdana menteri dan didukung oleh Uni Soviet. Pada tanggal 9 September

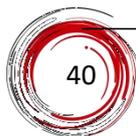


1948, Kim Il Sung secara resmi mengumumkan berdirinya Republik Demokratik Korea Utara (Korut).

Awalnya, pemerintah Korea Utara membentuk konfederasi yang terdiri dari berbagai faksi komunis, antara lain faksi kelompok gerilya anti-Jepang dalam negeri, faksi Gerakan Komunis Kembali dari Tiongkok, dan faksi tuan rumah. pendidikan komunis dari Rusia.

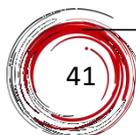
Kim Il-sung, meskipun basisnya lemah di dalam negeri, tetapi sebagai pemimpin yang mewakili Uni Soviet, ia menjadi pemimpin tertinggi Korea Utara. Oleh karena itu, pada awalnya dapat dikatakan bahwa perkembangan politik Korea Utara adalah proses Kim Il-sung mengkonsolidasikan kekuasaannya di Korea Utara, dan cara untuk meningkatkan kekuasaannya adalah dengan "memurnikan" lawan politiknya secara bertahap.

Pada masa-masa awal pecahnya kedua negara di semenanjung Korea ini, kekuatan kedua negara sangat berimbang. Pasukan Amerika

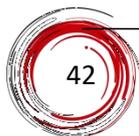


meninggalkan Korea Selatan dan Uni Soviet, dan China mendukung Korea Utara secara ekonomi dan militer. Dampak dari perbedaan ini tidak terduga. Pada awal 1950-an, ketegangan meningkat antara Utara dan Selatan atas klaim yurisdiksi bersama atas Semenanjung Korea.

Struktur Korea Utara mirip dengan Uni Soviet pada 1960-an ketika diperintah oleh Josep Stalin. Negara ini telah membangun kekuatan militer yang besar dan industri berat, salah satunya pertambangan. Upaya untuk menciptakan sistem ekonomi sosialis berkembang pesat, karena nasionalisasi semua industri dimulai sebelum pemerintah dibentuk, segera setelah memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Jepang. , membentuk dasar dari sistem penanaman kolektif. Pada bulan Agustus tahun yang sama, sebuah undang-undang disetujui tentang nasionalisasi pabrik besar, perusahaan, tambang, pembangkit listrik, transportasi, layanan pos, perbankan, kantor komersial dan budaya.

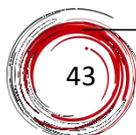


Meskipun kegiatan ekonomi tingkat individu skala kecil diizinkan selama Perang Korea untuk mengkompensasi defisit tingkat produksi, sebagian besar ekonomi Korea Utara dinasionalisasi dan digunakan secara kolektif. Hingga tahun 1958, pertanian, kerajinan tangan, dan usaha kecil digabungkan menjadi bentuk koperasi, melengkapi "sosialisme dalam hubungan produksi". Setelah berakhirnya sistem koperasi pertanian, Korea Utara berinvestasi dalam produksi peralatan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas. Hingga tahun 1961, administrasi pertanian setempat yang dipimpin oleh Panitia Rakyat sub-distrik dipisahkan dan kemudian dipindahkan ke biro ahli pertanian "Komisi Administrasi Koperasi Pertanian" untuk secara langsung mengelola kegiatan pertanian, termasuk pabrik mesin pertanian, pabrik, kantor pengairan, bahan baku. . pemasok dan karantina ternak. Pada tahun 1962, organisasi tersebut diberi nama "kolkhoz", menciptakan sistem manajemen kolektif Korea Utara. Berkat kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh penjajah Jepang, di mana sebagian



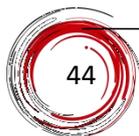
besar pembangkit listrik dan fasilitas industri terletak di bagian utara semenanjung Korea, pada awalnya membantu Korea Utara lebih mudah mewujudkan pembangunan ekonomi modern dan industrialisasi ekonomi.

Rencana pembangunan ekonomi Korea Utara dimulai setelah kemerdekaan atau sebelum pembentukan pemerintahan. Rencana pembangunan dua tahun dilaksanakan pada tahun 1947 dan 1948. Pada tahun 1949, sebuah rencana pembangunan dua tahun diluncurkan untuk menghilangkan faktor-faktor negatif yang tersisa dari pendudukan Jepang di sektor industri dan untuk meningkatkan produksi, namun rencana pembangunan tersebut ditangguhkan karena Perang Korea. Pada bulan April 1954, pada pertemuan ke-7 Majelis Rakyat Pertama Korea Utara, diputuskan untuk meningkatkan produksi ke tingkat sebelum perang, dan rencana pembangunan tiga tahun untuk menghidupkan kembali perekonomian dilaksanakan. Rencana tersebut berhasil diselesaikan 4 bulan lebih



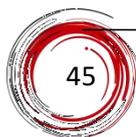
cepat dari jadwal dengan bantuan China dan Uni Soviet.

Pada tahun 1957, REPELITA (5 tahun) dilaksanakan untuk menciptakan basis industri ekonomi sosialis dan menyediakan sandang, pangan, dan perumahan bagi masyarakat. Bantuan dari China dan Uni Soviet serta negara komunis lainnya memungkinkan Korea Utara mencapai tujuannya dua tahun lebih cepat dari jadwal. Pemerintah mempromosikan pencapaian tujuan produksi yang cepat dan pembangunan ekonomi sosialis dengan kecepatan yang sama dengan kuda mitos Chollima, oleh karena itu kebijakan ini disebut Gerakan Chillima. Gerakan Chollima mewakili kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk mobilisasi penduduk secara massal dan efektif. Pemerintah Korea Utara percaya bahwa peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan mengubah dan memperbaiki pola pikir pekerja yang dipersenjatai dengan ideologi komunis yang komprehensif.



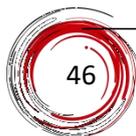
Dibuat sebagai garis umum Partai Buruh, gerakan ini dilakukan di seluruh pelosok Korea Utara, menurut Repelled, yang dimulai pada tahun 1957. Pada tahun 1959, gerakan ini dipromosikan lebih lanjut sebagai "Gerakan Gugus Tugas Chollima" dan gerakan berkontribusi pada pencapaian Rencana Pembangunan Lima Tahun Korea Utara. Gerakan Chollima digantikan pada tahun 1975 oleh "Bendera Merah 3 Gerakan Revolusioner Besar". Gerakan Chollima mendominasi sebagai gerakan yang meningkatkan persaingan antar pekerja di masyarakat Korea Utara. Pada tahun 1961, Korea Utara melaksanakan proyek pembangunan ekonomi berdasarkan sistem ekonomi sosialis. Pembangunan berlangsung dalam rangkap tiga rencana pembangunan 7 tahun, dan di tengah rencana pembangunan juga terdapat rencana pembangunan 6 tahun tambahan.

Rencana pembangunan 7 tahun pertama dimulai pada tahun 1961, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membangun basis industri yang diciptakan selama

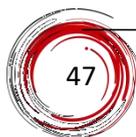


Repelled (5 tahun) pada akhir 1950-an. Pada masa ini, perekonomian Korea Utara mencapai industrialisasi, dengan penekanan pada industri berat seperti pembuatan peralatan mesin. Namun, kebijakan ini menemui kendala ketika industrialisasi yang hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri semakin terbatas. Sementara itu, Krisis Rudal Kuba pada Oktober 1962 membuat pemimpin Korea Utara merasa perlu meningkatkan kemampuan militernya. Inilah alasan mengapa Korea Utara menciptakan "Empat Arah Utama Kebijakan Militer", yang berfokus pada peningkatan investasi untuk meningkatkan kekuatan militer.

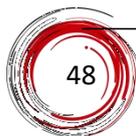
Korea Utara menemukan dirinya dalam situasi yang sulit antara China dan penentang Uni Soviet, yang menyebabkan penurunan bantuan ekonomi ke negara sosialis, yang menyebabkan keterlambatan tujuan rencana pembangunan. Jadwal rencana pembangunan tujuh tahun diperpanjang menjadi 3 tahun pada bulan Oktober 1966 pada rapat perwakilan partai politik; tetapi tujuan rencana pembangunan tidak tercapai.



Pada tahun 1970-an, sistem satu aturan Kim Il-sung menjadi dasar pendewaan Kim Il-sung dan putranya Kim Jong-il. Di bawah sistem kekuasaan Kim Il Sung yang kuat, Kim meletakkan dasar bagi Kim Jong Il sebagai pemimpin masa depan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembersihan kelompok oposisi yang menolak sistem dinasti pewaris tahta kekuasaan terus dilakukan. Kim Jong-il memulai pelatihan instruktur pada September 1973. Kim Jong-il diangkat sebagai sekretaris jenderal Partai Buruh. Pada saat yang sama, proses pemusnahan kekuatan oposisi yang menentang suksesi kekuasaan Kim Jong-il terus berlanjut, sampai ke adik laki-laki Kim Il Sung, Kim Young-ju, dan beberapa pejabat militer, termasuk Kim Dong-gyu, Rhee Yong-mu, dan Ryu Jang. -sik, dicopot dari jabatannya pada tahun 1973. Korea Utara awalnya melakukan diplomasi terbatas hanya dengan negara-negara komunis seperti China dan Uni Soviet. Namun, di negara komunis, konflik antara Rusia dan China membuat Korea Utara membuka hubungan dengan negara netral pada 1960-an. Pada tahun 1970-an,



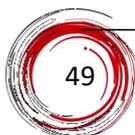
diplomasi dengan negara-negara Barat juga aktif dilakukan. Alasan perubahan kebijakan diplomatik Korea Utara adalah sebagai berikut: China menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1971, mencairnya hubungan antara Amerika Serikat dan China setelah kunjungan Presiden Nixon ke China pada tahun 1972, normalisasi hubungan China - hubungan Jepang, dan intensifikasi dialog antara kedua Korea di kancah internasional, termasuk PBB dan organisasi internasional lainnya. Pada pertemuan ke-6 Partai Buruh pada bulan Oktober 1980, pimpinan Korea Utara mengumumkan tiga prinsip dasar kebijakan diplomatik, yaitu kemerdekaan, persahabatan dan perdamaian, dan promosi keragaman dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat. Upaya membangun hubungan dengan Amerika Serikat juga digalakkan selama periode ini. Dalam pertemuan Dewan Rakyat dan Komite Pusat bulan Januari 1984 untuk membahas "langkah-langkah baru untuk menciptakan suasana damai di Korea", diusulkan



bahwa diperlukan pertemuan ketiga antara kedua Korea. dan Amerika Serikat

Pada 1970-an dan 1980-an, Korea Utara mengalami periode yang relatif stabil di bawah kepemimpinan tunggal Kim il-sung. Namun, keterbatasan sistem struktur sosialis masih menghambat pembangunan ekonomi Korea Utara.

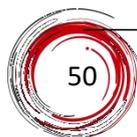
Sistem kompetisi tenaga kerja sosialis negara itu, bantuan dari negara-negara komunis lainnya, dan kebijakan ekonomi yang dipikirkan dengan matang dikombinasikan dengan infrastruktur industri Korea Utara yang subur diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, Korea Utara menghadapi berbagai masalah, antara lain kebijakan pembangunan ekonomi Stalinis Uni Soviet yang terbatas, hubungan yang terganggu antara Uni Soviet dan Cina, diplomasi egaliter Korea Utara terhadap kedua negara, keterbatasan sistem struktur ekonomi terpusat, mobilisasi besar-besaran negara. . . dari populasi. dan isolasi ekonomi mereka dari ekonomi pasar global. Hingga berujung pada



masalah ekonomi Korea Utara. Kesenjangan ekonomi antar Korea semakin lebar bahkan melebar sejak tahun 1970-an.

Pada akhir 1980-an, ketegangan internasional meningkat ketika Korea Utara mengakui pengembangan senjata nuklirnya. Pekerjaan pengembangannya termasuk eksperimen untuk memperkaya uranium, langkah pertama dalam pembuatan senjata nuklir. Krisis nuklir Korea Utara dimulai pertama kali saat Korea Utara menarik diri dari NPT (Perjanjian non-proliferasi nuklir) di tahun 1993. Korea Utara sempat menandatangani pernyataan sepakat untuk menaati perjanjian NPT dengan IAEA (Badan tenaga atom internasional) pada Januari 1992.

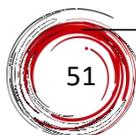
Untuk bergabung dalam perjanjian NPT tersebut, pihak IAEA melakukan 6 kali inspeksi di Korea Utara. Dalam inspeksinya, IAEA menemukan bukti mencurigakan berupa beberapa kilogram plutonium yang bisa membuat senjata nuklir telah diekstrak. Ini menunjukkan adanya selisih sebanyak



90 gram lebih banyak dari yang telah dilaporkan Korea Utara pada awalnya. Atas dasar hasil tersebut, IAEA meminta pelaksanaan inspeksi khusus. Korea Utara justru menolak permintaan tersebut, dan memilih untuk menarik diri dari NPT sebagai aksi protes.

Pada 8 Juli 1994, pemimpin Korea saat itu, Kim Il Sung, meninggal dunia setelah serangan jantung mendadak. Setelah kepergiannya, putranya Kim Jong Il mengambil alih kepemimpinan Korea Utara. Kim Jong il menerapkan ideologi yang dikenal dengan “Songgun” atau kurang lebih diartikan sebagai “tentara yang utama”. Kim Jong Il menggunakan pendekatan militer dan lebih tertarik pada pengembangan bidang ini, dan keinginannya adalah mengubah Korea Utara dari pemerintahan komunis tradisional menjadi kediktatoran militer.

Kemudian pada tahun 2005, Korea Utara mengumumkan telah berhasil melakukan uji coba nuklir pertamanya. Sejak keberhasilan ini, Korea Utara mengejar ambisinya sebagai negara yang

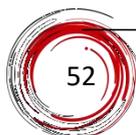


memiliki senjata pemusnah massal, meskipun kondisi negaranya sendiri sedang bermasalah.

Pada 17 Desember 2011, Kim Jong-Il meninggal, mengakhiri pemerintahannya di Korea Utara. Putranya Kim Jong-Un kemudian mengambil alih pemerintahan. Selama kepemimpinannya, ia banyak mengeluarkan kebijakan kontroversial. Pemimpin yang notabene masih muda ini membuat kebijakan yang meresahkan masyarakat internasional, terutama terkait dengan uji coba rudal, baik nuklir maupun bukan.

3. Masa Awal Korea Selatan

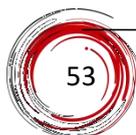
Meskipun sejarah Korea secara resmi dimulai dengan berdirinya Korea pada tanggal 15 Agustus 1948, Syngman Rhee memproklamasikan negara tersebut pada tanggal 13 Agustus di Seoul. Republik Korea (Hangul: 대한민국), atau lebih dikenal dengan Korea Selatan, adalah sebuah negara Asia Timur yang membentuk wilayah selatan Semenanjung



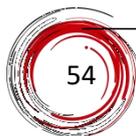
Korea. Di sebelah utara, Korea Selatan berbatasan dengan Korea Utara, dan kedua negara itu bersatu hingga tahun 1948. Ia memiliki Laut Kuning di sebelah barat, Jepang melintasi Laut Jepang, dan Selat Korea di sebelah tenggara. Negara ini dikenal oleh orang Korea Selatan sebagai Hanguk (한국) dan oleh orang Korea Utara sebagai Korea Selatan (남조선).

Negara dengan ibukota Seoul (서울) ini memiliki sejarah perkembangan yang ditandai dengan pergantian rezim demokratis dan otoriter. Republik pertama awalnya mengklaim pemerintahan yang demokratis, namun lambat laun menjadi otoriter dan akhirnya runtuh pada tahun 1960. Republik kedua yang benar-benar demokratis ini harus digulingkan oleh rezim militer otoriter dalam waktu singkat. Republik Keenam adalah pemerintahan yang stabil dan menganut prinsip demokrasi liberal.

Mulai tahun 1962, Korea Selatan meminjam uang dari negara lain untuk melaksanakan rencana



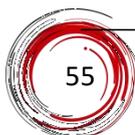
ekonominya. Pekerjaan pertama adalah menggunakan mesin dan bahan impor untuk menghasilkan barang untuk ekspor nanti. Selama periode ini, berbagai pabrik dibangun dan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong masuknya investasi asing. Ditambah dengan tenaga kerja yang sangat terampil, Korea Selatan mampu memproduksi produk yang menyaingi negara maju. Pada 1970-an, industri ini berkembang menjadi sektor kimia berat. Ekspor produk kimia berat meningkat pesat selama periode ini. Pada tahun 1979, Presiden Park Chung-hee dibunuh, menandai berakhirnya Republik Keempat. Pemerintah kemudian jatuh ke tangan seorang jenderal bernama Chun Doo-hwan. Di bawah konstitusi baru, Jenderal Chun terpilih sebagai Presiden Republik Kelima. Kebangkitan Mr. Chun dibarengi dengan ketidakpuasan masyarakat yang menginginkan demokratisasi. Awal periode ini ditandai dengan peristiwa Gerakan Demokratisasi Mei di Gwangju.



4. Upaya Reunifikasi Korea

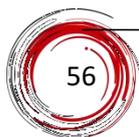
Padahal, rencana penyatuan Korea Selatan dan Korea Utara sudah lama dibahas. Proses penyatuan dimulai dua dekade lalu, pada Agustus 2000, lebih tepatnya dengan Deklarasi Utara-Selatan, di mana negara-negara sepakat untuk menerapkan kebijakan penyatuan guna mewujudkan semenanjung Korea yang bersatu dan damai di masa depan. Meski reunifikasi telah lama dibicarakan, kenyataannya Korea Selatan dan Korea Utara belum menemukan secercah harapan.

Asian Games 2018 yang digelar di Indonesia dua tahun lalu memang menjadi cerita mengharukan di Korea setelah 70 tahun konflik yang silih berganti. Angkatan bersenjata Korea Selatan dan Korea Utara bersatu di bawah nama Semenanjung Korea di bawah bendera unifikasi. Selain itu, pentingnya penyatuan sebenarnya telah dibuktikan di situs resmi Korean Union Institution, yang berfokus pada kerja sama antar-Korea, bantuan kemanusiaan, hak asasi manusia, transportasi antar-Korea, dan



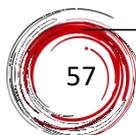
berbagai cara untuk mencapai Korea yang bersatu. di dalam distrik-distrik di.

Namun nyatanya, reunifikasi semenanjung Korea berulang kali mengalami dinamika ketidakpastian karena gaya kepemimpinan Korea Utara, Kim Jong Un, terlihat cukup labil. Gaya kepemimpinan presiden berusia 36 tahun itu identik dengan karakter kediktatoran dan penerapan pemerintah pusat. Dia tidak segan-segan menghukum dan memecat siapa pun yang dianggap tidak kompeten atau melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, sifat otoriter Kim Jong-Un menjadi salah satu dari banyak hambatan unifikasi. Korea Utara dapat secara sepihak mengakhiri perjanjian yang telah disepakati antara kedua negara jika dianggap tidak memiliki kepentingan nasional. Dapat dikatakan bahwa presiden yang memiliki kekuasaan sah di Korea Utara saat ini sangat enggan untuk mengambil langkah menuju reunifikasi.



Implementasi kebijakan reunifikasi Semenanjung Korea yang selama ini belum terlaksana dengan baik merupakan hal yang wajar. Korea Selatan dan Korea Utara memiliki perbedaan yang cukup berbeda, terutama dalam hal ideologi. Hal ini tentu akan menjadi tantangan bagi kedua belah pihak untuk menyatukan kekuatan. Sulit membayangkan Korea Utara menerima dan menerapkan ideologi liberal di negara mereka dan sebaliknya untuk Korea Selatan. Selain itu, baik Korea Selatan maupun Korea Utara memiliki tuntutan yang sulit dipenuhi satu sama lain.

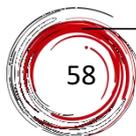
Korsel meminta Korut melakukan denuklirisasi. Selain itu, Korea Utara juga harus bersedia mengumumkan semua senjata dan fasilitas nuklirnya serta menyetujui inspeksi oleh Badan Energi Atom Internasional untuk memeriksa fasilitas nuklir Korea Utara. Hal ini sepertinya sangat tidak bisa dipahami mengingat Korea Utara adalah negara yang sangat tertutup. Faktanya, Korea Utara masih menghadapi dilema keamanan dan masih berusaha



mencapai keseimbangan kekuatan dengan negara lain.

Persyaratan yang ditawarkan Korea Utara sama sulitnya bagi Korea Selatan. Negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un itu menuntut penarikan pasukan Amerika dari Korea Selatan. Beberapa waktu lalu, adanya latihan militer bersama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian Unifikasi Korea dan mengganggu KTT 2018. Selain itu, Korea Utara juga baru-baru ini memprotes para pembelot yang melarikan diri ke Selatan. Korea, menuduh mereka memberikan perlindungan. Para pembelot juga kerap mengirimkan makanan dan selebaran propaganda kepada warga Korea Utara. Mereka mendorong rakyat Korea Utara untuk bangkit dan menentang rezim otoriter Kim Jong-un.

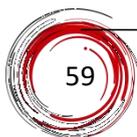
Akibatnya, Korea Utara mengancam akan membatalkan reunifikasi dan menggunakan kekuatan militer terhadap para pembelot. Penulis melihat ini sebagai ancaman terhadap kesepakatan



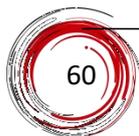
unifikasi yang telah lama diperjuangkan. Ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara tidak boleh diremehkan. Sudah sepantasnya Korea Selatan bertindak cepat dan langsung menghukum para pembelot, yang berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara.

Situasi panas akibat eksodus para pembelot tidak akan terlalu mempengaruhi kemajuan proses reunifikasi Semenanjung Korea. Banyak persoalan, seperti asimilasi ideologi politik, imigrasi, otonomi daerah, dan kerja sama ekonomi, yang tidak boleh dipandang sebagai pembelot semata. Masalah penyatuan jangka panjang tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan untuk memastikan masa depan semenanjung Korea sebagai kawasan damai yang saling menguntungkan.

Penggabungan dapat berhasil jika rasa saling percaya terus tumbuh. Kedua negara harus terbuka dan toleran terhadap satu sama lain. Jika berhasil,



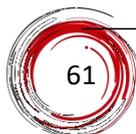
langkah yang tepat untuk menuntaskan penyatuan Korea bisa berupa pembentukan republik konfederasi. Ini menghubungkan kedua negara melalui perjanjian dan berbagai kebijakan. Akhirnya, negara-negara akan berkumpul dan menjalankan otonomi teritorial mereka sesuai dengan hak dan kewajiban yang disepakati bersama.



c. **P**endalaman Materi

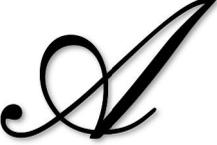
Semenanjung Korea telah mengalami banyak bentrokan akibat tarik ulur kepentingan dari negara-negara adidaya saat perang dunia kedua. Hasilnya, kedua negara ini terpisah, dan bahkan hingga kini masih berdiri sebagai dua negara terpisah, yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Berbagai upaya reunifikasi dilakukan, tetapi masih belum menunjukkan titik terang.

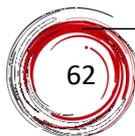
Jelaskan apa saja perbedaan mendasar yang membedakan Korea Utara dan Korea Selatan, dan alasan dari munculnya perbedaan tersebut!



Bab 4

Dinamika Kawasan Asia Timur

 Asia Timur merupakan salah satu kawasan menarik yang penuh dengan gejolak pasca perang dunia kedua. Dunia internasional pasca Perang Dingin memang banyak mengalami transformasi. Sistem kekuatan dunia yang awalnya bersifat bipolaritas antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet sebagai kutub-kutubnya, berubah menjadi multipolaritas dengan distribusi kekuatan yang relatif sama di antara negara-negara serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai payung universal. Sistem internasional juga dapat dikatakan cenderung unipolaritas dengan Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang cukup *powerfull* menentukan berbagai keputusan dalam tataran internasional. Kondisi ini pun banyak berpengaruh pada dinamika keamanan, diplomasi dan kepentingan ekonomi politik di kawasan Asia Timur.



a. Pokok Bahasan

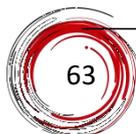
Materi pokok bahasan yang ditargetkan untuk dipahami pada bab ini, meliputi:

1. Dinamika keamanan kawasan Asia Timur
2. Kerjasama antar negaa kawasan Asia Timur.

b. Uraian Materi

1. Pengaruh Dunia Internasional terhadap Keamanan Kawasan Asia Timur

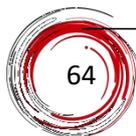
Asia Timur merupakan kawasan di sisi Timur Asia yang terdiri dari Republik Rakyat Cina, Taiwan, Mongolia, Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan. Namun, utamanya dinamika di kawasan ini lebih banyak dijalankan oleh lima negara saja, yaitu Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Korea Utara.



Kelima negara ini memiliki pengaruh kuat di kawasan dalam berbagai hal, seperti dalam bidang perekonomian, juga dari kekuatan dan peran militernya. Selain itu, lima negara ini juga memiliki kebijakan keamanan yang saling berkaitan satu sama lain.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, kawasan Asia Timur menjadi fokus perhatian internasional. Letak strategis kawasan ini menjadi semakin penting karena persaingan antara Amerika Serikat, Jepang, dan China untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Tidak seperti selama Perang Dingin, lingkungan politik internasional di kawasan Asia Timur Jauh telah berkembang dalam berbagai bentuk sebagai akibat dari hubungan multilateral dari negara-negara yang berkepentingan tersebut yang mencoba melepaskan diri dari hubungan yang bermusuhan dan konflikual.

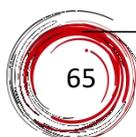
Ketidakstabilan sistem internasional pasca perang dingin banyak mempengaruhi Asia Timur. Situasi di Asia Timur masih belum kondusif,



konfrontasi di semenanjung Korea dan keputusan Jepang untuk tetap menjadi mitra keamanan Amerika Serikat memperumit keamanan Asia Timur. China juga lebih bebas menjalankan aktivitas kebijakan keamanannya. Semua itu membuat negara-negara di kawasan Asia Timur lebih memikirkan masalah keamanan kawasan dan mulai memperhatikan perkembangan kondisi yang dianggap sebagai sumber ancaman serta mencari cara untuk mengatasinya.

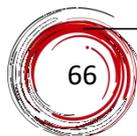
Jepang telah memutuskan untuk tetap menjadi mitra keamanan Amerika Serikat, konfrontasi antara Korea Utara dan Korea Selatan terus berlanjut, dan pertumbuhan kekuatan militer China dipandang sebagai peningkatan keamanan di kawasan Asia Timur. Sejarah Perang Dingin masih membekas dan memberikan ruang di mana persaingan antar negara di wilayah tertentu terus berlanjut.

Ada beberapa tema utama yang mewarnai dinamika keamanan di kawasan Asia Timur.



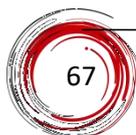
Pertama, masalah Jepang dengan negara tetangganya, ketegangan antara Cina dan Jepang, dan perang yang belum selesai antara negara-negara di semenanjung Korea. Negara-negara Asia menyadari kemungkinan konflik regional di Asia Timur sebagai ancaman besar. Oleh karena itu, negara-negara Asia Timur terus berusaha memajukan pertahanan nasionalnya dengan memperluas kekuatan militer dan kemampuan persenjataannya.

Faktor terpenting dalam konteks ini adalah bahwa negara adalah organisasi politik yang didasarkan pada wilayah tertentu. Lokasi suatu negara memengaruhi perilakunya terhadap negara lain, dan perbatasannya menentukan wilayah yang biasanya diakuinya sebagai bagian dari kontrolnya. Hubungan hukum antar negara merupakan faktor penting yang mempengaruhi cara negara memperlakukan satu sama lain. Hal-hal yang membahayakan kelangsungan hidup unit kolektif tertentu dipandang sebagai ancaman eksistensial. Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk



menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin dengan sumber daya yang tersedia dan memprioritaskannya, termasuk memperkuat kekuatan militer.

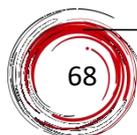
Kompleksitas keamanan di kawasan Asia Timur yang terdiri dari empat faktor utama, yaitu kedekatan geografis, anarkisme regional, polaritas kekuasaan, dan struktur sosial yang diwujudkan dalam persahabatan dan permusuhan, menciptakan dilema keamanan ketika suatu negara atau sekelompok negara mengkompromikan kemampuan militernya. . tinggi dan kemampuan karena tujuan keamanannya menurunkan tingkat keamanan negara lain di sekitarnya. Dilema ini ditandai dengan adanya aliansi militer dan pertumbuhan anggaran militer negara yang pada akhirnya menimbulkan kompleksitas keamanan. Ketika suatu negara merasakan ketakutan dan ancaman, maka secara tidak langsung berusaha melindungi kepentingan nasionalnya akibat ancaman aliansi militer dan kekuatan militer negara lain yang semakin besar. Bentuk aksi-reaksi yang dapat dilakukan ketika



muncul dilema keamanan adalah pelaksanaan kerjasama atau aliansi keamanan ketika negara tidak mampu meningkatkan kemampuan militernya sendiri.

Munculnya saling permusuhan juga dipengaruhi oleh faktor sejarah yang kuat. Faktor ini dapat menimbulkan perasaan permusuhan yang negatif. Kompleksitas keamanan merupakan fenomena empiris berdasarkan faktor sejarah, kedekatan geografis, dan manifestasi dari hasil interaksi antar negara. Unsur-unsur tersebut tersusun secara paralel dan saling melengkapi serta dapat ditempatkan sebagai satuan penjelas bagi hubungan-hubungan yang terjadi pada suatu wilayah tertentu.

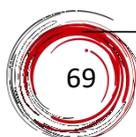
Dalam kaitannya dengan keamanan, Asia Timur merupakan kawasan dengan lingkungan yang sangat sensitif dan rentan dalam arti kawasan ini memiliki berbagai masalah dengan berbagai instabilitas keamanan. Ketidakstabilan keamanan di Asia-Pasifik disebabkan oleh beberapa isu yang



muncul di Asia-Pasifik seperti: sengketa wilayah (teritorial), proliferasi senjata nuklir, terorisme, perlombaan senjata dan persaingan antar kekuatan besar. Ketundukan Jepang pada kekuatan Sekutu dalam Perang Dunia Kedua benar-benar membentuk Jepang sebagai negara di bawah hegemoni Amerika dalam artian Amerika Serikat selalu mempengaruhi setiap kebijakan luar negeri, terutama kebijakan pertahanan Jepang sebagai negara hegemonik dan sebagai sekutu terpenting Jepang di Asia. wilayah Pasifik.

2. Aliansi Militer Kawasan Asia Timur

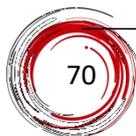
Asia Timur adalah kawasan yang sangat dinamis, kompleks, dan menarik dengan hubungan keamanan nasional. Sejauh ini, Asia Timur dipandang sebagai wilayah dengan intensitas keamanan tinggi dan ketegangan dilema strategis yang meningkat. Konflik, kerja sama, permusuhan (permusuhan) dan persahabatan (aliansi) antar



bangsa, yang difasilitasi oleh faktor sejarah dan perbedaan ideologis, semakin membedakan kawasan ini dari kawasan Asia lainnya.

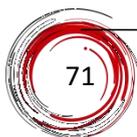
Hubungan persahabatan (aliatif) merupakan salah satu hubungan yang paling menentukan situasi keamanan di kawasan Asia Timur. Yang penting, aliansi ini “mengundang” kehadiran negara adidaya di kawasan. Ciri-ciri tersebut, yang terlihat dalam dua tahun terakhir, terutama dalam uji coba nuklir kekerasan Korea Utara sejak 2016, pasti membuat khawatir negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan. Uji coba nuklir Korea Utara "berakhir" dengan nada tinggi dengan diadakannya KTT AS-Korea Utara di Singapura pada 12 Juni 2018. Yang mengejutkan dunia adalah pertemuan antara dua pemimpin paling berpengaruh, Donald Trump dan Kim Jong Un, yang dikaitkan dengan agresivitas Korea Utara dalam beberapa tahun terakhir.

Kehadiran negara-negara adidaya di kawasan, dengan segala kepentingan geopolitiknya, tentu menambah kompleksitas hubungan keamanan antar



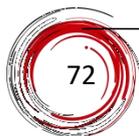
negara di kawasan. Kehadiran Amerika Serikat selalu dipandang sebagai penghambat hubungan yang lebih harmonis di kawasan, terutama oleh China dan Korea Utara. Aliansi AS-Korea Selatan juga saat ini menghadapi beberapa kendala.

Presiden Donald Trump dilaporkan kecewa dengan presiden baru Korea Selatan Moon Jae-in, yang telah mengejar diplomasi damai sebagai tanggapan atas tekanan nuklir Korea Utara. Sangat sulit bagi Korea Selatan untuk selalu menyeimbangkan kepentingannya dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, hubungan perdagangan regional yang meningkat dengan China akan berarti ketergantungan kebijakan ekonomi dan perdagangan Korea Selatan pada Amerika Serikat akan menjadi terbatas. Sementara itu, sekutu AS lainnya di kawasan itu, yakni Jepang, juga memiliki hubungan yang rumit dengan AS, China, Korea Utara, dan Korea Selatan. Yang menarik adalah hubungan antara Jepang dan Korea Utara. Jepang sekarang mulai mengubah kebijakannya terhadap Korea Utara.



Doktrin militer dan strategis mulai menguat dan menjadi penopang utama kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe yang sebelumnya identik dengan pendekatan sipil yang lebih harmonis. Kebijakan militeristik ini tentu saja meningkatkan sentimen terhadap Korea Selatan yang selama ini bersikap lebih harmonis terhadap Korea Utara. Sentimen anti-Jepang Korea Selatan semakin kuat karena faktor sejarah. Warga Korea Selatan masih menyimpan kebencian dan trauma mendalam dari pendudukan Jepang di Semenanjung Korea selama Perang Dunia II.

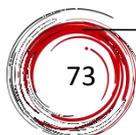
Asia Timur, khususnya semenanjung Korea, selalu menjadi titik strategis di mana kepentingan kekuatan besar berbenturan. Jika Korea Selatan dan Utara bersatu di bawah komunisme selama Perang Dingin dan mempertahankan hubungan dekat dengan Uni Soviet, Korea Selatan akan menjadi ancaman bagi Cina dan Jepang. Sebaliknya, jika Utara dan Selatan menjadi mitra keamanan China, akan berbahaya bagi Uni Soviet dan Jepang. Bahkan setelah berakhirnya Perang Dingin, rezim keamanan



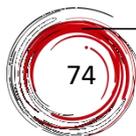
di Semenanjung Korea tidak banyak berubah. Secara geopolitik, kawasan semenanjung Korea antara China dan Jepang terus berfungsi sebagai jembatan budaya.

Semenanjung Korea juga berfungsi sebagai koridor agresi antara rakyat Korea satu sama lain oleh China, Jepang, dan Amerika Serikat. Misalnya, jika Korea Selatan diperintah oleh China, keamanan Jepang akan terancam, dan jika Jepang merebut kekuasaan di Korea Selatan, itu akan menjadi ancaman bagi China. Peran kunci Semenanjung Korea berarti Amerika Serikat tidak akan membiarkan Utara dan Selatan, terutama Korea Selatan, menjadi mitra keamanan China. Jika itu terjadi, Jepang akan kehilangan kepercayaan terhadap Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan di kawasan Asia.

timur. Hilangnya kepercayaan ini akan mendorong Jepang untuk mempertimbangkan kembali kebijakan keamanannya dan memutuskan untuk memperluas persenjataan nuklirnya. Peran

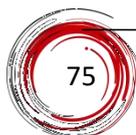


kritis Semenanjung Korea inilah yang mendorong Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan membentuk aliansi pertahanan timbal balik untuk saling melindungi kepentingan dan menjaga stabilitas keamanan kawasan. Situasi di atas menjadi pedoman utama aliansi pertahanan antara Amerika Serikat dan Jepang. Pada bulan April 1997, Presiden AS Bill Clinton dan Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto bertemu di Tokyo untuk membahas Deklarasi Keamanan Amerika Serikat-Jepang: Aliansi untuk Abad Kedua Puluh Satu. Perjanjian tersebut menekankan pentingnya aliansi AS-Jepang untuk kepentingan domestik dan regional. Lebih lanjut dokumen tersebut menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Jepang telah melakukan upaya bersama untuk memperkuat kerja sama, khususnya dalam meningkatkan kerja sama keamanan, meninjau kembali Pedoman Kerja Sama 1978, dan non-proliferasi di kawasan Asia Timur. Ditandatangani secara resmi pada bulan September 1997, tujuan utama perjanjian tersebut adalah untuk mengusahakan kerjasama keamanan yang efektif



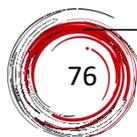
antara Amerika Serikat dan Jepang, khususnya dalam mengantisipasi ancaman serangan militer dan gangguan keamanan Jepang. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Jepang mulai lebih memperhatikan dan memperhatikan kerja sama keamanan multilateral. Jepang telah memutuskan untuk bekerja lebih proaktif untuk menjaga perdamaian dan keamanan, terutama untuk melindungi kepentingan nasionalnya di wilayah tersebut. Inisiatif ini dibuat oleh Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) untuk mempromosikan dialog keamanan. Pasukan Bela Diri juga menjadi bukti kehadiran Jepang dalam kerja sama keamanan regional, termasuk pertukaran militer dan program penelitian dan pelatihan bersama. Program ini kemudian akan melanjutkan pelatihan

Pada tanggal 28 November 1995, rancangan Rencana Pertahanan Nasional (NDPO) dirilis. Rencana ini terdiri dari empat tema berikut: (1) Kontribusi terhadap perdamaian internasional melalui kegiatan kerjasama perdamaian internasional. (2) Berkontribusi untuk



mempromosikan kerjasama internasional dalam partisipasi bantuan bencana internasional. (3) mempromosikan dialog dan kerja sama keamanan di antara negara-negara Asia Timur; (4) kerjasama Jepang dengan PBB dan badan lainnya dalam upaya pengendalian dan perlucutan senjata untuk mencegah proliferasi senjata pemusnah massal dan senjata konvensional lainnya, termasuk senjata nuklir.

Untuk menegaskan kepentingannya di Asia Timur, Amerika Serikat tidak hanya akan menjalin aliansi militer dengan Jepang, tetapi juga akan menjalin aliansi militer dengan Korea Selatan. Pada tanggal 8 September 1945, pasukan Amerika Serikat mendarat di Semenanjung Korea untuk pertama kalinya setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Tugas utama militer adalah melucuti tentara Jepang dan menduduki wilayah Jepang. Dalam perkembangannya, Amerika Serikat menjadi pendukung utama berdirinya Republik Korea, melindungi Republik Korea dari ancaman luar, dan



memberikan perkembangan ekonomi Republik Korea.

Aliansi militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan telah ada sejak era Perang Dingin. Sejak itu, aliansi tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1954, Amerika Serikat dan Korea Selatan menandatangani perjanjian keamanan bersama yang dimaksudkan untuk melindungi satu sama lain dari ancaman serangan asing. Dengan demikian, sejak berakhirnya Perang Korea, keamanan Korea Selatan sangat bergantung pada aliansi militernya dengan Amerika Serikat, termasuk upaya menangkis serangan dari Korea Utara. Peran penting yang dimainkan AS sejak berakhirnya perjanjian tersebut dapat dilihat dengan melihat tingkat bantuan ekonomi dan militer AS ke Korea Selatan.

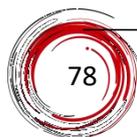
Pada tahun 1970-an, bantuan ekonomi dan militer AS ke Korea Selatan menyumbang 8% dari total bantuan AS ke negara-negara di seluruh dunia. Amerika Serikat juga terus mendukung Korea



Selatan dalam organisasi internasional agar dapat memperjuangkan kepentingannya sendiri. Di balik aliansi, masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda untuk dicapai. Melalui aliansi ini, Amerika Serikat ingin membendung pengaruh Uni Soviet dan China, sedangkan Korea Selatan ingin menghalangi serangan Korea Utara.

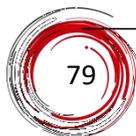
Aliansi AS-ROK sekarang sudah mapan. Maret 2015, Martin E. Dempsey, Kepala Staf Gabungan AS, bertemu dengan Jenderal Choi Yoon-hee, Panglima Angkatan Bersenjata Korea Selatan, di sebuah acara di Kepala Staf Gabungan Korea Selatan di Seoul. Aliansi Nasional Amerika Serikat dan Korea Selatan. Salah satu implementasi dari pertemuan tersebut adalah untuk bekerja pada peningkatan pertahanan rudal dan konsolidasi sistem pertahanan udara.

Kerja sama strategis antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang terutama karena isu perdamaian, keamanan dan stabilitas di Semenanjung Korea, serta konfrontasi dengan China.



Isu Semenanjung Korea dianggap sebagai isu paling penting dan mengancam keamanan dan kepentingan Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat di kawasan Asia Timur.

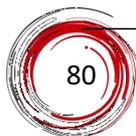
Upaya tersebut terus didorong oleh pengembangan mekanisme kerja sama strategis, khususnya di bidang militer. Selain itu, kerja sama trilateral ini juga berfokus pada isu peningkatan anggaran militer China di kawasan Asia Timur. Peran pasukan AS dan sekutu di Jepang dan Korea Selatan dipandang penting dalam mengatasi masalah keamanan masing-masing. Apalagi China dan Korea Utara tetap menjadi ancaman bagi Jepang dan Korea Selatan, sehingga koordinasi dan konsultasi antara Amerika Serikat dengan Jepang dan Korea Selatan tetap diperlukan. Oleh karena itu, perlu menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur dengan membangun aliansi militer. Aliansi militer diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di antara negara-negara Asia Timur.



3. Geoekonomi Kawasan Asia Timur

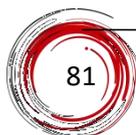
Kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang menjadi teater perebutan kekuasaan geopolitik atau sering disebut sebagai papan catur besar perebutan geopolitik. Kondisi ini menjadikan kawasan Asia Timur menjadikan beberapa negara penting seperti China dan Jepang sebagai negara dengan posisi penting. Dinamika kawasan Asia Timur tidak terlepas dari beberapa isu penting, seperti konfrontasi antara Korea Utara dan Korea Selatan, hubungan antara China dan Jepang, yang tidak terlepas dari sejarah kolonialisme Jepang masa lalu, yang juga menjadi penghambat bagi Korea Selatan.

Kompleksitas hubungan antar negara di kawasan Asia Timur ini tetap menghadirkan kontestasi sekaligus kerjasama kawasan demi mencapai kepentingan masing-masing. Melalui skema geostrategi dan geoekonomi, negara-negara di kawasan ini tetap berupaya untuk menghidupkan kerjasama yang saling menguntungkan. Geo-



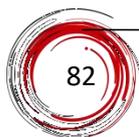
ekonomi dapat menjadi alat tata negara yang halus, tetapi tidak semua alat seperti itu tidak berbahaya dan penyebarannya dapat mengganggu stabilitas negara serta sistem internasional. Di era globalisasi geoekonomi, interaksi dan transformasi faktor geoekonomi menjadi lebih cepat, jaringan geoekonomi menjadi lebih besar dan kompleks, dan interaksi geoekonomi antar negara menjadi lebih kompleks dari sebelumnya.

Dunia yang terus berkembang dengan sistem multipularnya, semakin menjadikan geoekonomi sebagai hal di Asia Timur. Geo-ekonomi telah menjadi terkenal di Asia Timur terutama karena kebangkitan Cina sejak memasuki Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001. Meskipun peningkatan pesat dalam pengeluaran untuk kemampuan militernya, Cina pada dasarnya adalah kekuatan geo-ekonomi. , menggunakan hubungan ekonominya dengan tetangganya untuk mencapai tujuan politik. Salah satu contoh awal dari hal ini adalah penangguhan China selama dua bulan ekspor tanah jarang ke Jepang pada tahun 2010.



Hal ini terkait dengan meningkatnya ketegangan bilateral atas sengketa wilayah Kepulauan Senkaku (yang juga diklaim dan disebut China sebagai Diaoyu). Contoh lain adalah perselisihan antara Korea Selatan dan China atas keputusan Seoul untuk mengizinkan penyebaran domestik sistem rudal anti-balistik Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) AS. Beijing khawatir sistem THAAD dapat digunakan untuk memata-matai China dan menggunakan paksaan ekonomi, termasuk memboikot barang-barang buatan Korea Selatan di China, untuk mencoba memaksa pemerintah Korea Selatan mengubah arah. Presiden China Xi Jinping telah secara resmi mengartikulasikan dorongan geo-ekonomi China melalui kebijakan khususnya, 'Belt and Road Initiative' (BRI) dari pinjaman dan pembangunan luar negeri.

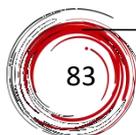
Karena peningkatan standar hidup, status ekonominya, dan tren demografis yang mengesankan di kawasan ini, China diproyeksikan akan semakin meningkat kepentingannya di abad ke-21. Selain China, tiga ekonomi inti di kawasan



Asia Timur yang sering diperhitungkan sebagai negara *new emerging country*, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan. Ketiga negara ini berada dalam tarik menarik untuk meningkatkan pengaruhnya secara regional dan global.

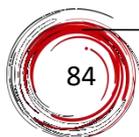
Namun, sementara China secara bertahap menjadi salah satu aktor global yang paling menonjol, signifikansi komparatif Jepang dan Korea Selatan mulai menurun dalam beberapa dekade terakhir. Akibatnya, keseimbangan kekuatan di Asia Timur terguncang. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, konferensi berfokus pada dimensi geopolitik dan geoekonomi dari dinamika perubahan Asia Timur dalam beberapa dekade mendatang.

Munculnya pendekatan geoekonomi China menjadi faktor penentu dalam menegaskan kepentingan geostrategis. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan perluasan pasar domestik Tiongkok terus berkembang dan menjadikan Tiongkok sebagai produsen barang terbesar di Asia. China juga



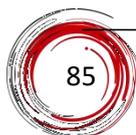
memperkuat daya saing ekspornya, yang menyebabkan perubahan transaksi ekonomi negara-negara tetangga di Asia. Terakhir, kebijakan ekonomi regional dapat memperkuat China sebagai kekuatan baru yang berpengaruh di kawasan. Dengan Amerika Serikat tidak berpartisipasi dalam Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) dan inisiatif OBOR baru yang sekarang lahir, Amerika Serikat sekarang jelas "menyerahkan" kekuatan ekonominya di kawasan Asia-Pasifik ke China.

Rencana infrastruktur OBOR China yang ambisius akan diimplementasikan dalam pembangunan bendungan, jalan, permukiman, dan kereta api berkecepatan tinggi antara China selatan dan barat. Dalam pengertian ini, dapat dikatakan bahwa Asia dan Pasifik "dikendalikan" oleh China. Saat pembangunan jalur kereta api Asia berlangsung, negara-negara seperti Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan mendapatkan koneksi laut komersial melalui pelabuhan Iran. Dengan cara ini, OBOR bahkan dapat membuka kembali jalur kereta api Indo-Pasifik yang berada di bawah kendali China.



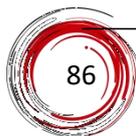
Selain China, Jepang juga memiliki motivasi dan potensi untuk mempengaruhi tatanan ekonomi regional. Kemakmuran ekonominya sangat bergantung pada perdagangan dan investasi di Asia-Pasifik, dan sebagai ekonomi terbesar ketiga di dunia, itu cukup besar untuk mempengaruhi perubahan. Peluang bagi Jepang tetap terletak pada kemampuannya untuk menggeser perimbangan kekuatan di kawasan, sementara tantangan berkisar pada bagaimana Jepang dapat secara mandiri memimpin lembaga-lembaga berbasis aturan. Kebijakan Jepang telah bergeser ke strategi liberal baru yang menekankan pembangunan institusi regional dan penetapan aturan.

Pergeseran keseimbangan geoekonomi memperkenalkan ketidakpastian yang lebih besar, pemerintah Jepang harus berkontribusi untuk menciptakan tatanan regional yang kuat yang akan mendukung kemakmuran berkelanjutan di kawasan itu terlepas dari perubahan dalam pemerintahan AS atau peningkatan ambisi geopolitik China.



Persaingan dan kerja sama adalah paradigma paling dasar dari hubungan geo-ekonomi, dan pengaruhnya yang mengakar menyebabkan studi tentang jenis hubungan geo-ekonomi bergantung pada kecenderungan kerja sama dan kompetitif yang jelas. Dalam penelitian sebelumnya, logika persaingan dan kerjasama secara bertahap berkembang menjadi berbagai bentuk, seperti simbiosis, saling melengkapi, persaingan, permainan, dan permusuhan.

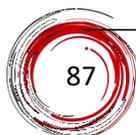
Hubungan geo-ekonomi antar negara dirangkum sebagai dominasi-kompetisi atau dominasi-kooperatif, dan jenis hubungan geo-ekonomi dibagi menjadi persaingan dan kerja sama. Namun, terkait interaksi aliran elemen geoekonomi, aktivitas geoekonomi antar negara selalu berdampingan dengan persaingan dan kerja sama. Kompleksitas, diversifikasi, ketergantungan, dan ruang aliran adalah karakteristik hubungan geo-ekonomi. Jika jenis hubungan geo-ekonomi dibagi menjadi kompetisi dan kerjasama, ini tidak hanya mengabaikan beberapa atribut hubungan geo-



ekonomi, tetapi juga mengabaikan peran elemen endogen dan eksogen, seperti basis geografis, kekuatan pasar, dan kekayaan sumber daya, dalam hubungan geo-ekonomi.

Padahal, perkembangan geoekonomi merupakan hasil perpaduan berbagai elemen, seperti letak geografis, geopolitik, permintaan pasar, dan kekayaan sumberdaya yang saling melengkapi. Kedekatan membantu memastikan lokasi geo-ekonomi yang menguntungkan dan meletakkan dasar untuk pembangunan zona kerjasama geo-ekonomi perbatasan. Hubungan geo-ekonomi antar negara sampai batas tertentu bergantung pada hubungan geopolitik mereka, dan jaringan kerja sama ekonomi internasional dan konstruksi koridor ekonomi yang dibangun oleh BRI telah memperdalam kerja sama geo-ekonomi antara Tiongkok dan MSRC.

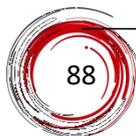
Di era informatisasi dan globalisasi ini, kekuatan pasar lebih kuat dari sebelumnya, dan arus perdagangan dan arus investasi adalah elemen aliran



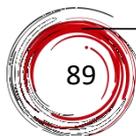
inti yang membentuk pemeliharaan hubungan geo-ekonomi. Pertumbuhan perdagangan internasional didorong oleh pertumbuhan pasar impor dan ekspor global, dan pertumbuhan arus investasi didorong oleh kemakmuran pasar keuangan internasional.

Heterogenitas kekayaan sumber daya menentukan bahwa negara-negara perlu mengalokasikan sumber daya pada skala global dan mempromosikan kompetisi atau kerja sama geo-ekonomi antar negara sehingga mereka menempati posisi geo-ekonomi yang menguntungkan dalam jaringan produksi global. Oleh karena itu, analisis jenis hubungan geoekonomi tidak dapat dibatasi pada logika persaingan dan kerja sama, tetapi harus diperluas ke elemen dominan hubungan geoekonomi, seperti jarak, geopolitik, pasar, dan sumber daya, untuk lebih memahami karakteristik dominan dari jenis hubungan geo-ekonomi.

Padahal, elemen dominan hubungan geo-ekonomi tidak hanya mencakup jarak, politik, pasar, dan sumber daya, tetapi juga geo-budaya dan



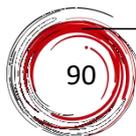
struktur industri. Namun, ini bukan standar untuk klasifikasi tipe geo-relasi dalam penelitian ini, terutama karena alasan berikut. Pertama, peradaban Asia Timur yang berpusat di Tiongkok memiliki pengaruh terbatas pada negara-negara Jalur Sutera Maritim, dan ruang lingkungannya terutama meluas ke Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan negara-negara Asia Tenggara. Kedua, geo-ekonomi dipengaruhi oleh pelengkap struktur industri dan transfer industri, tetapi penyesuaian dan optimalisasi struktur industri China saat ini masih berlanjut, sehingga memberikan kontribusi yang lemah terhadap pembangunan geo-ekonomi. Selain itu, studi yang relevan menunjukkan bahwa hubungan geoekonomi secara signifikan dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti pasar, jarak geografis, dan geopolitik.



c. **P**endalaman Materi

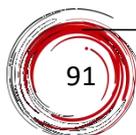
Negara-negara di Asia Timur berusaha untuk mencapai kepentingannya dengan berbagai cara. Meski terdapat hubungan kompleks yang dilatarbelakangi sejarah yang rumit antar negara-negara di dalamnya, aliansi kerjasama masih dipertahankan demi menjaga kepentingan keamanan kawasan. Beberapa negara di Asia Timur pun memiliki target tersendiri dalam mencapai kepentingan melalui geostrategi dan geoekonomi yang semakin masif.

Jelaskan negara-negara dengan kepentingan geoekonomi kuat di kawasan Asia Timur, dan langkah apa yang dilakukan dalam mencapai kepentingan tersebut!

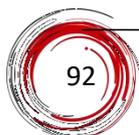


DAFTAR PUSTAKA

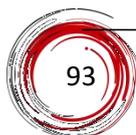
- Akaha, T. 1998. Beyond Self Defense: Japan Exclusively Security Role Under the New Guidelines for US-Japan Defense Cooperation. *The Pacific Review*. Vol. 11 (4).
- Al Syahrin, M.N. 2018. China Versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Global & Strategis*. Vol 12 (1), pp. 145-163.
- Al Syahrin, M.N. 2018. Donald Trump dan Reorientasi Kebijakan Keamanan Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Vol 14 (1), pp. 97-111
- Al Syahrin, M.N. 2018. Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*. Vol 3 (1), pp. 1-17
- Bailey, J. 2007. *Great Power Strategy in Asia: Empire, Culture and Trade, 1905–2005*. New York. Routledge.
- Bendini, R. 2016. *United States - China Relations: A Complex Balance Between Cooperation and Confrontation*. Directorate General for External Policies Policy Department. European Union.
- Bennett, B.W. 2010. *Uncertainties in the North Korean Nuclear Threat*. National Defense Research Institute. California.
- Bert, W. 2003. *The United States, China, and Southeast Asian Security: A Changing of the Guard*. Palgrave Mcmillan. London.



- Berteau, D.J. & Green, M.J. 2012. U.S. Force Posture Strategy in the Asia Pacific Region: An Independent Assessment. CSIS Press. Washington, D.C.
- Booth, K. & Wheeler, N. J. 2008. The Security Dilemma: Fear, Cooperation and Trust in World Politics. Palgrave Macmillan. London.
- Brown, P.J. 2018. Japan feeling isolated as Seoul, US and North Korea talk. Selengkapnya di <http://www.atimes.com/article/japan-feeling-isolated-as-seoul-us-and-north-korea-talk/>. Diakses pada 18 Oktober 2022.
- Buzan, B. & Lemaitre, K.M. 1990. The European Security Order Recast: Scenarios for the Post Cold War Era. Pinter. London.
- Buzan, B. & Waever, O. 2003. Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge University Press. New York.
- Chen, D. 2017. US-China Rivalry and Taiwan's Mainland Policy Security, Nationalism, and the 1992 Consensus. Palgrave Mcmillan. Swiss.
- Cipto, B. 2010. Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Courmont, B. 2016. Trump's Foreign Policy: Implications For Europe And East Asia, Iris: Institut De Relations Internationales Et Strategiques.
- CSIS. 2018. China Power. What does China really spend on its military?. CSIS. Selengkapnya dalam <https://chinapower.csis.org/military-spending/>. Diakses pada 6 September 2022.

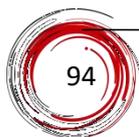


- Dugis, V. 2015. Memahami Peningkatan Kehadiran China di Pasifik Selatan: Perspektif Realisme Strategik. *Jurnal Global & Strategis*. Vol 9 (1). pp. 1-18.
- Dyer, G. 2014. US-China: Is This the New Cold War? The New Era of Military Competition in the Pacific Will Become the Defining Geopolitical Contest of the 21st”. Selengkapnya dalam <https://www.ft.com/content/78920b2e-99ba-11e3-91cd-00144feab7de> . Diakses pada 12 Maret 2023.
- Erickson, A.S. 2012. ‘Changing Military Dynamics in East Asia, Through The Lens of Distance: Understanding and Responding to China’s “Ripples of Capability”,’ *Policy Brief*, no. 10.
- Feffer, J. 2009. Introduction to the Special Issue: An Arms Race in Northeast Asia?. *Asian Perspective*. Vol. 33 (4).
- Fisher, M. 2016. ‘What Is Donald Trump’s Foreign Policy?’ *The New York Times*. Selengkapnya dalam <http://www.nytimes.com/2016/11/12/world/whats-donald-trumps-foreign-policy.htm>. Diakses pada 11 November 2022.
- Goh, E. & Simon, S. W. (eds.), 2008. *China, The United States, And Southeast Asia: Contending Perspectives on Politics, Security, And Economics*. New York: Routledge.
- Goo, Y.W. & Lee, S.H. 2014, ‘Military Alliances and Reality of Regional Integration: Japan, South Korea, the US vs. China, North Korea,’ *Journal of Economics Integration*, vol. 29, no. 2, pp. 332-347.
- Grevatt, J. 2017. South Korea Boosts Defence Spending. Selengkapnya dalam

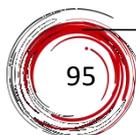


<http://www.janes.com/article/73404/south-korea-boosts-defence-spending>. Diakses pada 23 Agustus 2022.

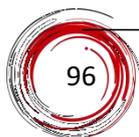
- Grice, F. 2017. The Improbability of Popular Rebellion in Kim Jong-un's North Korea and Policy Alternatives for the USA. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 4 (3), pp. 263–293.
- Hanson, M. 2007, *Nuclear Weapons in the Asia Pacific: A Critical Security Appraisal*. In Burke, A. & McDonald, M (eds.), *Critical Security in the Asia Pacific*. Manchester University Press. Manchester.
- Hayes, P. & Moon, C. 2016. *The North Korean Nuclear Multilemma: Options to Break the Nuclear Deadlock in Northeast Asia*. Institute of Korean Studies. Vol. 47 (4).
- Hofbauer, J & Hermann, P. & Raghavan, S. 2012. *Asian Defense Spending 2000–2011*, CSIS Report of the Defense Industrial Initiatives Group, Washington, D.C.
- Holland, A. 2017. *China's One Belt, One Road: An Ambitious Strategy Challenging the U.S.* American Security Project. Selengkapnya di <https://www.americansecurityproject.org/chinas-one-belt-one-road-an-ambitious-strategy-challenging-the-us/>. Diakses pada 25 Oktober 2022.
- Huang, D. 2015. "Building Security and Integration in The Asia Pacific"(online). dalam <http://www.eastasiaforum.org/2015/06/13/building-security-and-integration-in-the-asia-pacific/>. Diakses pada 4 April 2023.
- Hwang, J. 2003. Rethinking the East Asian Balance of Power: Historical Antagonism, Internal Balancing, and the Korean-Japanese Security Relationship, *World Affairs*, vol. 166, (2).



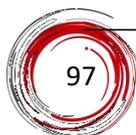
- Hwang, J. & Dongxiao, C. 2010. "China's Harmonious Asia Strategy". *International Area Review*. Vol 13 (2), pp. 1-20.
- Information Office of the States Council. 2013. *The Diversified Employment of China's Armed Forces*. Beijing: China's Government.
- Inoguchi, T. & Ikenberry, G. J. (eds.). 2013. *The Troubled Triangle: Economic and Security Concerns for the United States, Japan, and China*. Palgrave Mcmillan. New York.
- Irsan, A. 2005. *Jepang: Politik Domestik, Global & Regional*. Hasanuddin University Press. Makassar.
- Jee, D.E. 2015. 'Why North Korea is so Freaked out by US-ROK Drills,' *The Diplomat*, <<http://thediplomat.com/2015/03/why-north-korea-is-so-fre-akedout-by-us-rok-drills/>>, diakses pada 29 Maret 2023.
- Jervis, R. 1978. "Cooperation Under the Security Dilemma," *World Politics*, vol. 30 (2), pp. 167-214.
- Johnson, J., & Kikuchi, D. 2018. "With Historic Meeting of Leaders, North Korea, and China Shore Up Leverage as Kim-Trump Talks Loom." *The Japan Times*. Selengkapnya dalam <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/28/asia-pacific/historic-meeting-leaders-north-korea-china-shore-leverage-kim-trump-talks-loom>. Diakses pada 2 Juni 2022.
- Jost, T. 2017. "The New Pessimism of U.S. Strategy Towards China". Selengkapnya dalam <https://warontherocks.com/2017/12/new-pessimism-u-sstrategy-towards-china/>. Diakses pada 29 Maret 2023.



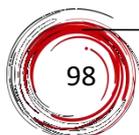
- Kang, D.C. 2009. Between Balancing and Bandwagoning: South Korea's Response to China.' *Journal of East Asian Studies*. Vol. 9 (1).
- Katzenstein, P.J 2012. China's Rise: Rupture, Return, or Recombination,' dalam P.J. Katzenstein (ed.), *Sinicization and the Rise of China: Civilizational Processes Beyond East and West*. Routledge. New York.
- Kim, S. 2004. *The International Relations of Northeast Asia*. Rowman & Littlefield. Maryland.
- Lai, D. 2011. *The United States and China in Power Transition*. Strategic Studies Institute. Carlisle.
- Lake, D.A. & Morgan, P.M. 1997. *Regional Organs: Building Security in a New World*. Pennsylvania State University Press. Pennsylvania.
- Lanteigne, M., 2016. A Pivot to What? Asia-Pacific Foreign Policy under Trump. Policy Brief. Norwegian Institute of International Affairs.
- Layne,C. 2008. China's Challenge to US Hegemony. *Current History*. Januari, pp. 13-16.
- Mearsheimer, J. 2001. *The Tragedy of Great Power Politics*. Norton. New York.
- Mochammad, Y. 2010. Perspektif Game Theory Dalam Konflik Amerika Serikat-Korea Utara. *Verity*. vol. 2 (3).
- Moore, G.J., 2008. America's Failed North Korea Nuclear Policy: A New Approach. *Asian Perspective*. vol. 32. (4).
- Morgan, P. M. 2006. Deterrence and System Management: The Case of North Korea. *Conflict Management and Peace Science*. Vol 23 (2), pp. 121-138.



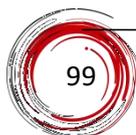
- Morgenthau, H.J. 2010. *Politic Among Nations, the Struggle for Power and Peace*, edisi Bahasa Indonesia Politik Antar Bangsa, diterjemahkan oleh Maimoen Fatwan & Cecep Sudrajat. Yayasan Pustaka Obor. Jakarta.
- Mubah, A.S. 2014. *Kajian Historis atas Kompleksitas Isu Taiwan dalam Hubungan China dan Amerika Serikat*. *Jurnal Global & Strategis*, vol 8 (2).
- Myers, R.J. 2001. *Korea in the Cross Currents: A Century of Struggle and the Crisis of Reunification*. Palgrave. New York.
- Nam, C. 2010. *Beijing and the 1961 PRC-DPRK Security treaty*. Naval Postgraduate School. California.
- Overhaus, M. & Brozus, L. 2016. *US Foreign Policy after the 2016 Elections*. German Institute for International and Security Affairs.
- Pinkston, D.A., 2006. *North Korea's Foreign Policy Towards the United States*. *Strategic Insights*. Vol. 5 (7).
- Revere, E.J.R. 2017. *2017: Year of Decision on the Korean Peninsula*, Korea Research Institute for National Strategy-Brookings Institution Joint Conference.
- Ruggiero, A. 2017. *Countering the North Korean Threat: New Steps in U.S. Policy*. Congressional Testimony. Washington. Foundation for Defense of Democracy.
- Saori N. Katada, "At the Crossroads: The TPP, AIIB, and Japan's Foreign Economic Strategy," *AsiaPacific Issues*, No. 125. May 2016. East West Center.
- Saunders, P.J. 2012. *Extended Deterrence and Security in East Asia: A U.S.-Japan-South Korea Dialogue*. Centre for National Interest. Washington, D.C.



- Schlosser, E. 2015. Today's nuclear dilemma. *Bulletin of the Atomic Scientists*. Vol 71(6), pp. 11–17.
- Schmidt, J. 2014. The Asia-Pacific Strategic Triangle: Unentangling the India, China, US Relations on Conflict and Security in South Asia. *Journal of Asian Security and International Affairs*. Vol 1 (2), pp. 203–222.
- Straub, D. 2016. North Korea Policy: Recommendations for The Trump Administration. Academic Paper Series. Korea Economic Institute of America.
- Suh, J.J. 2004. Assessing the Military Balance in Korea. *Asian Perspective*, vol. 28 (4).
- Suh, J.J. 2007. Power and Alliance: Assessing Military Balance in Korea. In *Power, Interest, and Identity in Military Alliance*. Palgrave Macmillan. New York.
- Syamsuddin, dkk. (eds.), *Politik dan Pemerintahan Korea*. INAKOS. Yogyakarta.
- Taley, M. & Olorunnipa, T. 2018. Trump Gave Kim a Summit But Left With Little to Show for It By. Selengkapnya dalam <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-12/trump-gave-kim-a-summit-but-left-with-little-to-show-for-it>. Diakses pada 18 Oktober 2022.
- Tang, S. 2009. Security Dilemma: A Conceptual Analysis. *Security Studies*. Vol. 18 (3), pp. 589-590.
- The State of Debate in China (1998-2014). *The British Journal of Politics and International Relations*. Vol 18 (2), pp. 422-442.
- Tsuneo, A. 2007. 'Non-Traditional Security Cooperation for Regionalism in Northeast Korea,' dalam K. Mori & W.



- Kenichiro (eds.), *A New East Asia: Toward a Regional Community*, National University of Singapore Press.
- Walt, S.M. 1985. Alliance Formations and the Balance of Power," *International Security*, vol. 9 (4), pp. 3-43.
- Wit, J. S., 2016. *The Way Ahead: North Korea Policy Recommendations for the Trump Administration*, US Korea Institute at Sais.
- Yang, F. 2016. Comparing China's Claims and Policies in the East and South China Seas: Implications for Regional Security. *Asian Security and International Affairs*. 3, (2). pp.135-156.
- Yoon Y.S. & Setiani, N. A. 2003. *Sejarah Korea Sejak Masa Awal Abad Hingga Masa Kontemporer*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Yoon, Y.S. & Mas'oed, M. 2010. Politik Luar Negeri Korea," dalam M. Syamsuddin, dkk. (eds.), *Politik dan Pemerintahan Korea*. INAKOS. Yogyakarta.
- Yuliantoro, N. R. Et all. 2016. Pemilihan Presiden Tahun 2016 dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol 5 (2), pp. 193-209.
- Zhao, Q. 2017. An Emerging U.S.-China Dual Leadership in Asia-Pacific. Selengkapnya dalam <https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/anemerging-us-china-dual-leadership-in-asia-pacific>. Diakses pada 10 Januari 2023.



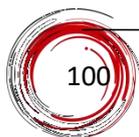
Profil Penulis

Andika Drajat Murdani

adalah dosen dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta.



Ia dipercaya mengampu berbagai mata kuliah, termasuk Studi Diplomasi Kawasan Asia Timur. Sejak S-1, ia memang telah banyak mengulas tentang negara-negara di kawasan Asia Timur, beserta dinamika wilayahnya. Lanjut ketika studi S2 dengan konsentrasi *Global Trade Diplomacy*, ia juga kembali mengulas dinamika ekonomi politik di kawasan Asia Timur, terutama di negara China. Hal ini membuatnya menjadi semakin dekat dan mengenal diplomasi kawasan yang terjadi di Asia Timur.



Buku ini menyajikan literatur bagi para pelajar atau umum yang hendak mendapat informasi tentang Asia Timur, terutama dari sudut pandang diplomasi dalam hubungan internasional. Penjelasan buku ini disusun secara runtut, tetapi masih dengan bahasan yang singkat dan dengan memilih pokok materi utama yang penting sebagai landasan pemahaman terkait kawasan Asia Timur. Dengan demikian, materi-materi tersebut dapat dipahami secara ringan sebagai acuan bagi para pembaca yang ingin memahami kontestasi dinamika diplomasi yang terjadi di kawasan Asia Timur. Buku ini memuat materi diplomasi kawasan yang berlangsung di masa sejarah, yang ditunjukkan sebagai landasan historis yang dapat menggambarkan referensi kondisi saat ini di Asia Timur. Nilai historis yang terjadi di suatu kawasan penting disajikan karena dapat menunjukkan benang merah tentang kondisi era kini, dan menjadi gambaran tentang latar belakang diplomasi suatu kawasan. Sebagai pelengkap, buku ini juga memaparkan bagaimana kerjasama, tarik ulur kepentingan dan geostrategi geoekonomi yang dijalankan oleh negara-negara utama yang banyak memegang andil di kawasan Asia Timur.



Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo,
Banjarsari, Kota Surakarta
press.unisri.ac.id | unisri.press@unisri.ac.id
unisripress@gmail.com
Anggota APPTI

ISBN 978-623-5859-55-2

